



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana

2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Buku ini adalah Laporan Akhir dari kegiatan “Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026” yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kajian ini dipimpin oleh Khoirunurrofik, Ph.D. dengan anggota, Budhi Ismayadi SE., MSE., Adityantari L. Dewi, SE., ME., Rhapsagita Malist Pamasiwi, S.Sos., Giani Raras, S.E., Jusuf King Sihotang, S.E., Kania Diah R., S.E., dan Rino Pandu W, S.E.

Tujuan penyusunan ini secara umum adalah untuk Menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026. Sedangkan secara khusus, tujuan penyusunan ini mencakup: (1) Menyediakan dokumen acuan resmi, (2) Menyediakan tolok ukur capaian kinerja dan evaluasi, (3) Menjabarkan gambaran kondisi pembangunan kesehatan secara umum, (4) Memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, (5) Memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur, (6) Memudahkan memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra ini mendapatkan Ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Tarempa, 05 Agustus 2022

**Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana**



Yessy Ariessandy, S.Farm, Apt

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19810418 200604 2 019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
GAMBAR JUDUL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	14
2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	15
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	16
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	16
2.2.2. Sarana Pelayanan Kesehatan	23
2.2.3. Unit usaha yang masih operasional.....	17
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	18
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja	18
2.3.2. Capaian Keuangan Daerah	21
2.4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	56
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	56
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	60
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI	63
3.3.1. TELAAH RENSTRA K/L	63
3.3.2. TELAAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI.....	66



3.4.	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	68
3.4.1.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	68
3.4.2.	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
3.4.3.	Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	74
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	79
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	83
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	83
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	87
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
6.1.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	91
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	132
BAB VIII	PENUTUP	136



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas	18
Tabel 2. 2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Fasilitas Kesehatan	22
Tabel 2. 3.	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Fasilitas Kesehatan	24
Tabel 2. 4.	Data Unit Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi.....	17
Tabel 2. 5.	Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas	18
Tabel 2. 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.....	21
Tabel 3. 1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	56
Tabel 3. 2.	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kepulauan Anambas Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan KKA	69
Tabel 3. 3.	Telaahan Pola Ruang Wilayah Kepulauan Anambas Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan KKA	70
Tabel 3. 4.	Telaahan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan PPKB KKA	73
Tabel 3. 5.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Berkaitan dengan Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75
Tabel 3. 6.	Kriteria Skoring Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas	81
Tabel 3. 7.	Hasil Skoring Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas	81
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Periode 2021-2026	84
Tabel 5. 1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.....	87
Tabel 7. 1.	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	133



GAMBAR JUDUL

Gambar 1.1.	Sistem Perencanaan Pembangunan	6
Gambar 2. 1.	Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas	16
Gambar 2. 2.	Bagan Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan PPKB KKA 2021.....	17
Gambar 2. 3.	Bagan Komposisi Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin 2021	18
Gambar 2. 4.	SDM Kesehatan Berdasarkan Eselon 2021.....	19
Gambar 2. 5.	SDM Berdasarkan Golongan Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021	20
Gambar 2. 6.	SDM Berdasarkan Sub-Golongan I Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021	21
Gambar 2. 7.	SDM Berdasarkan Sub-Golongan II Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021	21
Gambar 2. 8.	SDM Berdasarkan Sub-Golongan III Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021	22
Gambar 2. 9.	SDM Berdasarkan Sub-Golongan IV Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021	22
Gambar 3. 1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan sektor Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	75
Gambar 3. 2.	Prioritas Isu Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.....	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas atau perangkat Daerah serta merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selaras dengan hal di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).¹

Selain itu, untuk memenuhi amanat UUD 1945, diselenggarakan pembangunan nasional secara sistematis dan berkesinambungan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan



dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Hal tersebut juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, & meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (*goal 2*), menjamin kehidupan yang sehat & mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (*goal 3*), mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (*goal 5*), menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*goal 6*). Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 ayat (1) komponen pengelolaan kesehatan mencakup sub sistem: a) upaya kesehatan; b) penelitian dan pengembangan kesehatan; c) pembiayaan kesehatan; d) sumber daya manusia kesehatan; e) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; f) manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan g) pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pembangunan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas maka diperlukan Rencana Strategis di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga perlu mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran Visi Bupati Kepulauan Anambas terpilih yaitu “KEPULAUAN ANAMBAS SEBAGAI KABUPATEN MARITIM TERDEPAN YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”, dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama misi pertama yaitu: “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah” dan misi ketiga yaitu : “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa Yang Bersinergi”.

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 diharapkan dapat memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kepala Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas turut mempertimbangkan dokumen perencanaan lain di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan BKKBN

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan indikasi rencana program kegiatan bidang kesehatan di setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut juga menjadi rujukan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam bidang kesehatan.

Selain Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu mengacu pada rencana strategis yang dimiliki oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai panduan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dan indikasi rencana program kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat arah kebijakan pembangunan kesehatan dan indikasi rencana program kegiatan bidang kesehatan di setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dokumen Rencana Strategis tersebut juga menjadi rujukan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan,



Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.

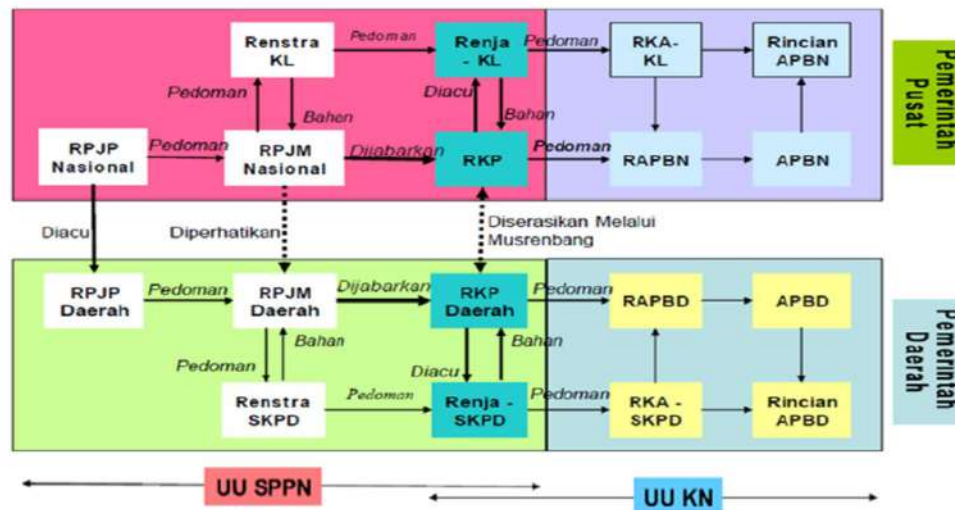
Selain Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu mengacu pada rencana strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau sebagai panduan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan dan indikasi rencana program kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas

RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen perencanaan 5 tahun di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, Renja disusun harus mengacu pada RPKD Kabupaten kepulauan Anambas.

Kedudukan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian yang utuh dari manajemen kerja pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam menjalankan agenda pembangunan kesehatan yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Sistem Perencanaan Pembangunan

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas adalah bagian dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, dan tidak terlepas dari kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah. Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil adalah Pancasila.
2. Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan Operasional adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);



- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi



Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 22 Februari 2022;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun penyusunan rencana strategis ini memiliki dua tujuan yaitu:

a. Tujuan Umum

Untuk Menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas beserta jaringannya, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, DPRD, swasta dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lainnya.
2. Untuk menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.
4. Untuk memudahkan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas beserta jaringannya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas, DPRD, swasta dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

5. Untuk memudahkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas beserta jaringannya, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, DPRD, swasta dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau



- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

Bagian BAB I

Memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yang memberikan detail dasar pemikiran dan dasar hukum penyusunannya. Di bagian ini juga dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bagian BAB II

Menguraikan mengenai gambaran pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas ditinjau dari aspek yang terkait erat dengan pelayanan seperti: tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan.

Bagian BAB III

Memberikan paparan mengenai berbagai macam isu strategis yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Renstra. Isu dilandasi oleh kondisi masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi di masa yang akan datang dan menguraikan permasalahan prioritas dan sasaran utama masalah kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam penentuan prioritas



masalah kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencakup penetapan kriteria penentuan prioritas masalah kesehatan, masalah kesehatan dan isu pembangunan kesehatan terkini, yang muncul dan urutan peringkat prioritas masalah kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian BAB IV

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya.

Bagian BAB V

Bagian ini merupakan pokok dari Renstra yang menguraikan mengenai strategi dan arah kebijakan. Dalam bagian ini penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk pelaksana pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang.

Bagian BAB VI

Berisi penjelasan mengenai program yang diuraikan dengan sistematika rencana program, bentuk kegiatan, dan sasaran program. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bagian BAB VII

Berisi tentang penetapan indikator kinerja pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bagian BAB VIII

Merupakan bagian penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, menetapkan bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, sedangkan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
4. Pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
5. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi *surveillance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
6. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga, serta peningkatan mutu dan perizinan pelayanan kesehatan;

7. Penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan dan pengawasan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan (nakes) serta pengembangan sistem informasi kesehatan;
8. Pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian, dan pengembangan kesehatan;
9. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
10. Pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta;
11. Pengarahan, pembinaan, dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, susunan organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana meliputi:

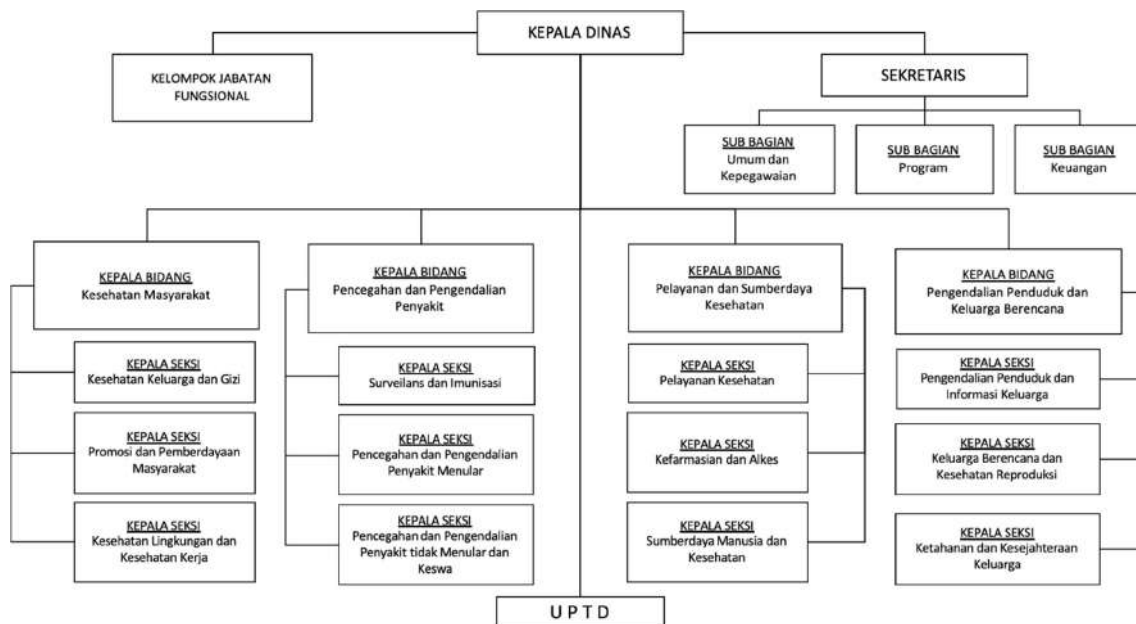
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- b. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

7. UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut secara detail digambarkan pada bagan di bawah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.



Gambar 2. 1. Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

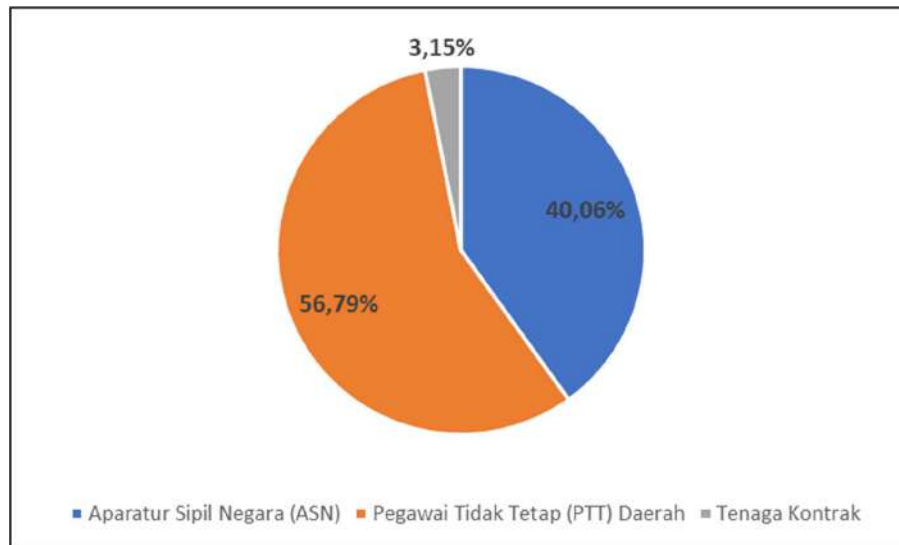
Sumber: Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Persentase Pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Jajaran berdasarkan status kepegawaian 2021 berjumlah 1016 orang dengan rincian sebagai mana yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kelompok Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah merupakan kelompok mayoritas yang mencakup lebih dari setengah yakni sebanyak 577 orang (56,79%) dari

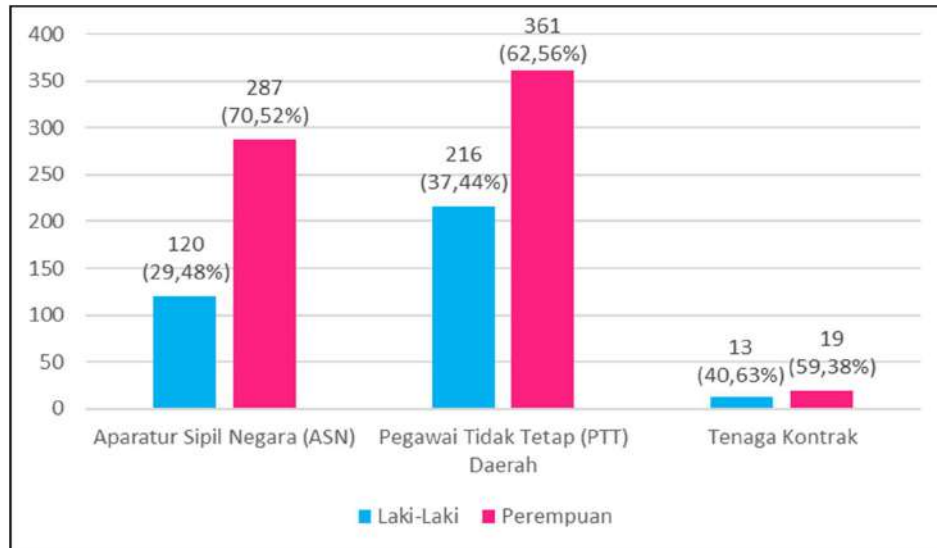
total pegawai di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di urutan kedua dengan jumlah 407 orang atau sekitar 40,06% dari total pegawai. Kelompok Tenaga Kontrak menjadi kelompok minoritas dengan jumlah 32 orang atau sekitar 3,15% dari total pegawai.



Gambar 2. 2. Bagan Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan PPKB KKA 2021

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari ketiga kelompok status kepegawaian di atas, semuanya didominasi oleh tenaga kesehatan dengan jenis kelamin perempuan sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kelompok Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah mayoritas diisi oleh tenaga kesehatan berjenis kelamin perempuan sebesar 70,52% atau 287 orang dari total 407 orang pegawai berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki komposisi 62,56% pegawai perempuan atau sebesar 361 orang dari 577 jumlah pegawai. Kelompok Tenaga Kontrak juga sebagian besar (59,38%) diisi oleh pegawai perempuan atau sebesar 19 orang dari 32 jumlah pegawai. Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki total 1016 pegawai dimana 65,65% (667 orang) memiliki jenis kelamin perempuan.



Gambar 2. 3. Bagan Komposisi Organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin 2021

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas

Pada tabel 2.1 dapat kita lihat bahwa proporsi terbesar jenjang pendidikan SDM Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas ialah Diploma Tiga (D-3) sebanyak 474 orang (46,65%). Sedangkan untuk jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1) dan Diploma Empat (D-4) mencakup sebanyak 282 orang (28,74%), dan Jenjang Strata Dua (S-2) masih terhitung kecil yakni sebanyak 17 orang (1,67%). Dari tabel tersebut juga terlihat masih terdapat 228 orang (22,44%) yang memiliki Pendidikan kurang dari D3 serta 5 orang (0,49%) yang tidak memiliki Pendidikan (non-Pendidikan).

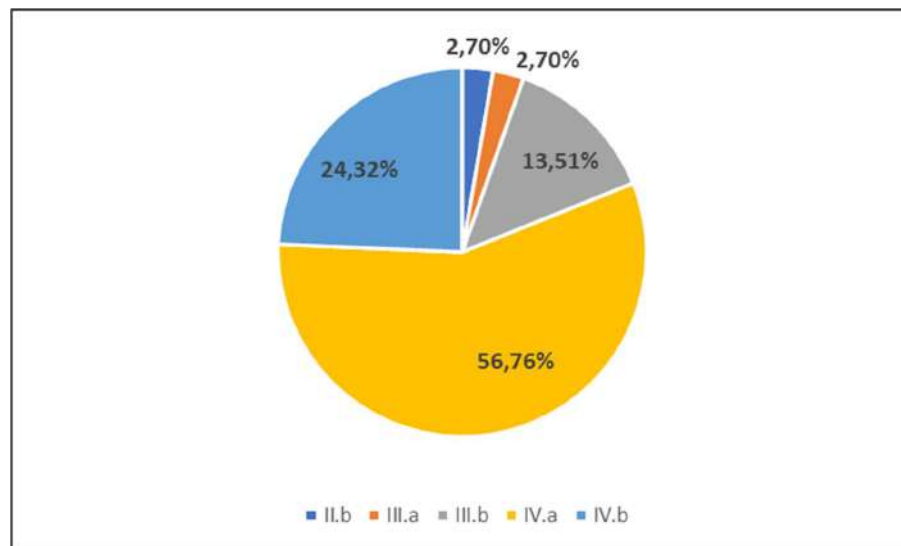
Tabel 2. 1. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SD / Setara	11	6	17
SMP / Setara	12	4	16
SMA / Setara	103	85	188
D-1	2	5	7
D-3	84	390	474
D-4	0	21	21
S-1	118	153	271
S-2	15	2	17
Non Pendidikan	4	1	5

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah	349	667	1016

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan Kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga disebut dengan Asisten Tenaga Kesehatan. Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di bawah supervisi tenaga kesehatan secara langsung.



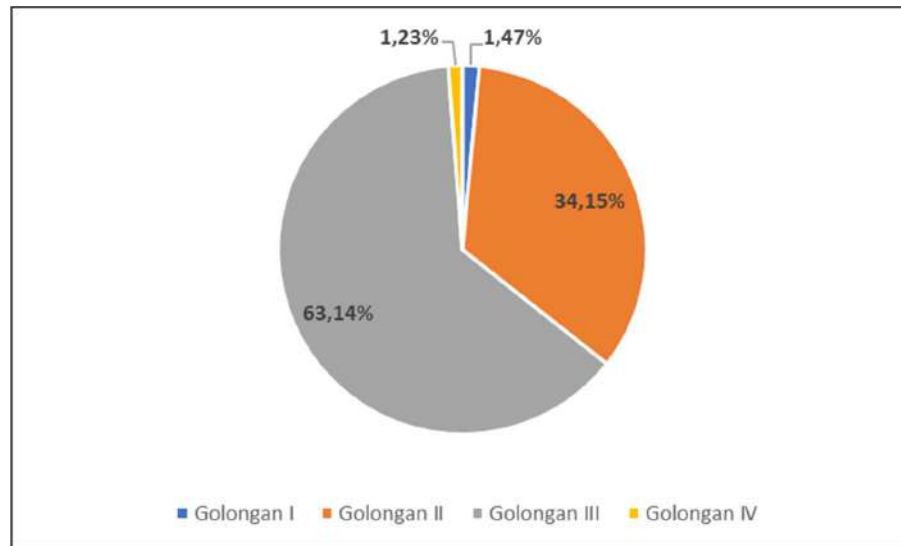
Gambar 2. 4. SDM Kesehatan Berdasarkan Eselon 2021

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar eselon SDM Kesehatan merupakan Eselon IV.a sebanyak 21 orang (56,76%). Di lain pihak, hanya terdapat satu orang pada masing-masing jabatan eselon II.b dan III.a dengan total hanya mencakup 5,40% dari jumlah eselon SDM Kesehatan. Total 37 orang eselon yang ada masih belum mencukupi jumlah SDM Kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yakni sebanyak 43 orang termasuk UPTD

yang ada.

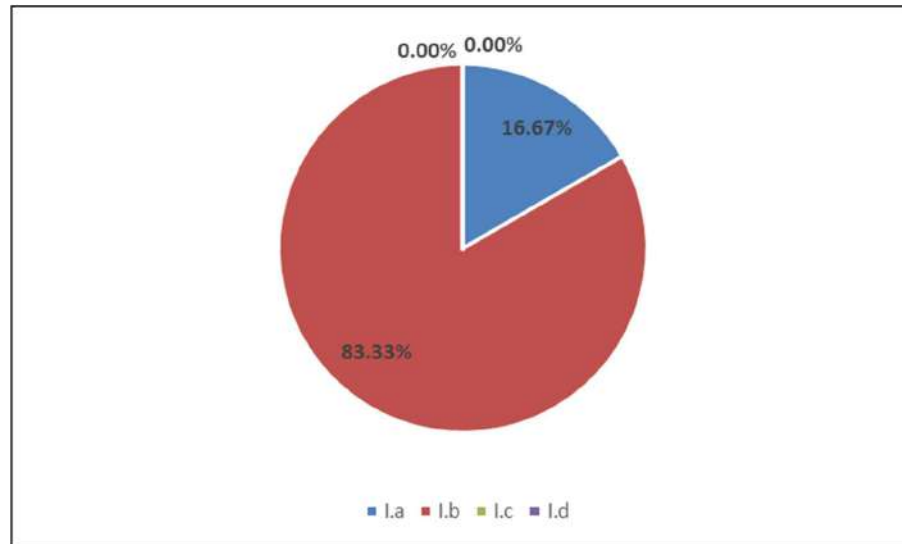
Berdasarkan golongan kepangkatan SDM Kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat 407 orang dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. 5. SDM Berdasarkan Golongan Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021

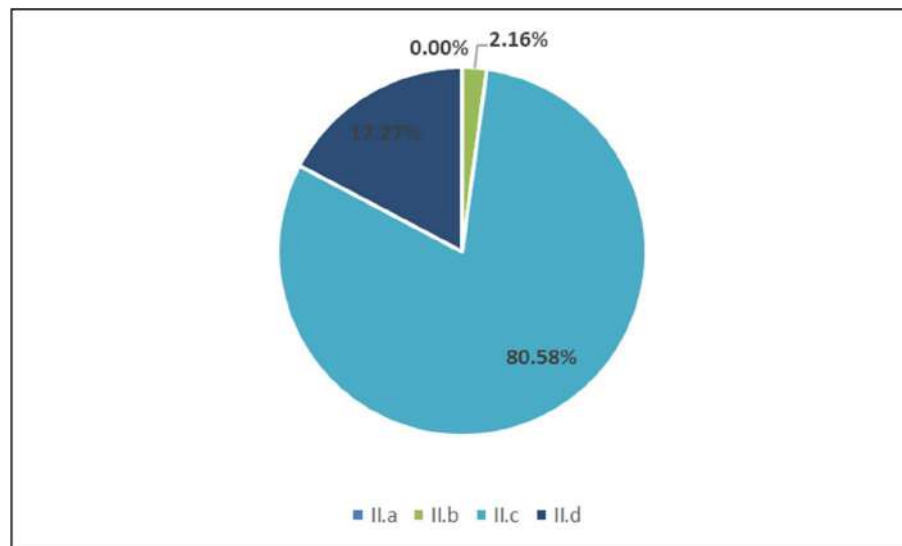
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas PNS SDM Kesehatan merupakan Golongan III sebanyak 257 orang (63,14%). Di lain pihak, hanya terdapat enam dan lima orang pada masing-masing jabatan Golongan I dan IV dengan total hanya mencakup 2,70% dari jumlah total. Sedangkan PNS golongan II berjumlah 139 orang atau meliputi lebih dari 1/3 (34,15%) dari jumlah total. Untuk detail masing-masing golongan, golongan I didominasi oleh sub golongan I.b yang berjumlah 5 orang (83,33%) dengan rincian pada gambar 2.6 di mana pada golongan I tidak ditemukan pegawai di golongan I.c dan I.d, golongan II didominasi oleh sub golongan II.c yang berjumlah 112 orang (80,58%) dengan rincian pada gambar 2.8 di mana pada golongan II tidak ditemukan pegawai di golongan II.a, golongan III didominasi oleh sub golongan III.b yang berjumlah 125 orang (48,64%) dengan rincian pada gambar 2.8, dan golongan IV memiliki jumlah yang sama antara sub golongan IV.a dan IV.b yang masing-masing berjumlah 2 orang (83,33%) dengan rincian pada gambar 2.9.



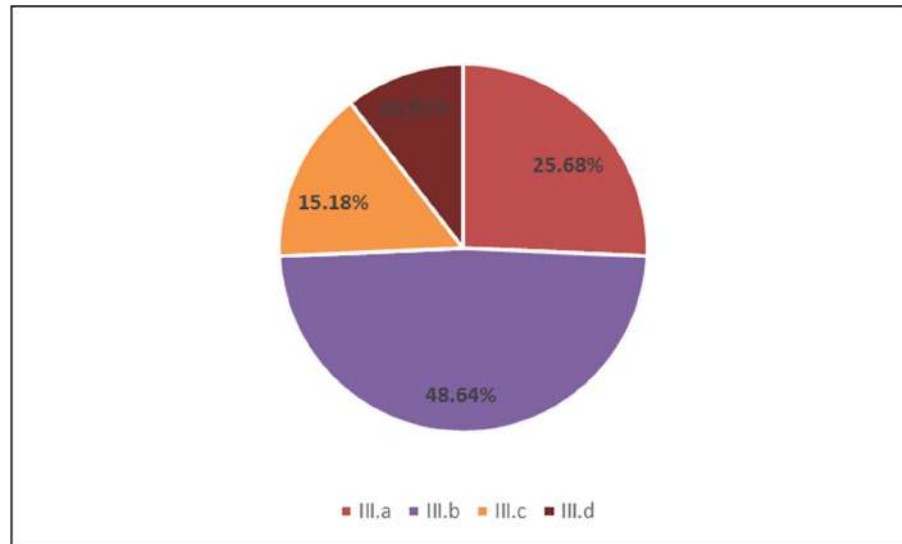
Gambar 2. 6. SDM Berdasarkan Sub-Golongan I Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas



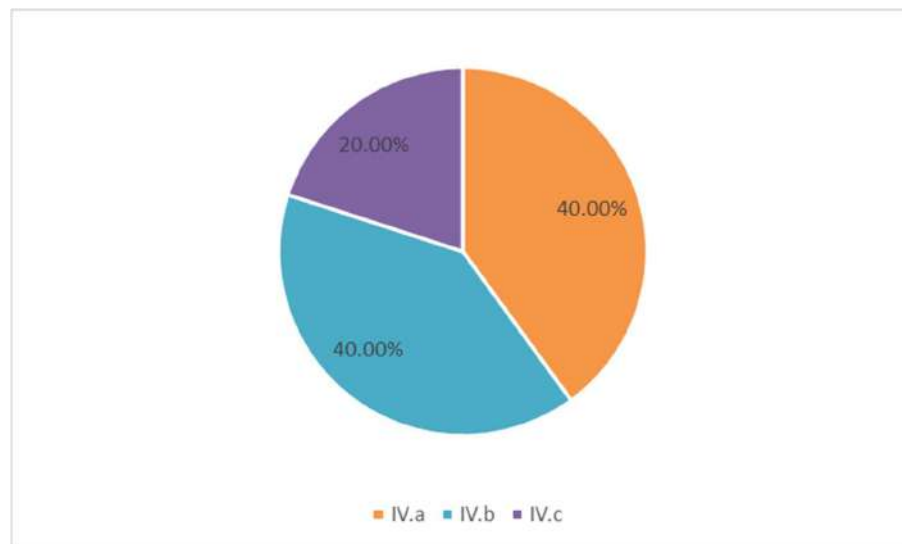
Gambar 2. 7. SDM Berdasarkan Sub-Golongan II Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas



Gambar 2. 8. SDM Berdasarkan Sub-Golongan III Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas



Gambar 2. 9. SDM Berdasarkan Sub-Golongan IV Kepangkatan yang Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas

Secara agregat, jumlah tenaga Kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Farmasi	Gizi
Puskesmas	0	34	7	180	116	7	10	11	14
Nakes di Puskesmas Per 1.000 Jumlah (47.402 Jiwa)	0.000	7.231	1.489	38.282	24.670	1.489	2.127	2.339	2.977
Rumah sakit	9	40	2	95	52	11	9	6	7
Nakes di Rumah Sakit Per 1.000 penduduk (47.402 Jiwa)	1.914	8.507	0.425	20.204	11.059	2.339	1.914	1.276	1.489

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinkes PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan pada enam profesi (dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, farmasi, dan gizi) lebih banyak bertempat di puskesmas dibanding rumah sakit. Di lain pihak, rumah sakit memiliki jumlah dokter spesialis, dokter umum, dan kesehatan masyarakat yang lebih banyak dibanding puskesmas yang bahkan tidak memiliki dokter spesialis. Mayoritas tenaga kesehatan yang ada berprofesi sebagai perawat serta bidan, di mana masing-masing berjumlah 275 dan 168 orang atau sekitar 45,08% & 27,54% dari jumlah total. Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki sedikit tenaga kerja yang berprofesi dokter di mana dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi masing-masing berjumlah 9, 74, dan 9 orang atau sekitar 1,48%, 12,13%, & 1,48% dari jumlah tenaga kesehatan.

2.2.2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2021 terakhir, hanya terdapat beberapa sarana kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki penambahan dari sisi kuantitas dibandingkan dengan tahun 2016. Penambahan terbanyak dimiliki oleh Puskesmas Keliling Laut (Kapal Speed) yang bertambah 4 unit. Sedangkan untuk Puskesmas, Puskesmas Keliling Darat (Motor), *ambulance*, dan Balai Pengobatan Umum masing-masing bertambah 3 unit. Selain itu, Rumah Sakit, Mobil Promosi Kesehatan, serta Mobil Antar Jemput Akseptor KB masing-masing bertambah 1 unit. Lebih dari satu per tiga (33%) sarana kesehatan yang dimiliki berbentuk Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dengan jumlah 54 PPKBD di tahun 2021, disusul dengan posyandu dan puskesmas pembantu yang masing-masing konsisten berjumlah 52 dan 42 unit unit. Sedangkan untuk

Klinik Keluarga Berencana (KKB) terdapat pengurangan 2 unit di tahun 2021 sehingga menjadi 14 unit di tahun 2021.

Tabel 2. 3. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Fasilitas Kesehatan

Sarana Kesehatan (unit)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit	2	2	3	3	3	3
Puskesmas	7	7	7	9	10	10
Puskesmas Pembantu	42	42	42	42	42	42
Polindes	4	4	4	4	4	4
Poskesdes	3	3	3	3	3	3
Posyandu	52	52	52	52	52	52
Klinik Bersalin	1	1	1	1	1	1
Puskesmas Keliling Laut (Kapal Speed)	10	10	10	10	11	14
Puskesmas Keliling Darat (Motor)	21	21	21	21	24	24
Ambulance	9	11	11	11	12	12
Balai Pengobatan Umum	3	3	3	3	3	3
Klinik Keluarga Berencana (KKB)	11	11	11	11	16	14
Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	54	54	54	54	54	54
Mobil Promosi Kesehatan	0	0	0	0	1	1
Mobil Antar Jemput Akseptor KB	0	1	1	1	1	1
Gedung Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	7	7	7	7	7	7
TOTAL	154	156	157	159	165	168

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

2.2.3. Unit usaha yang masih operasional

Pada tahun 2021, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 3 RSUD dan 10 Puskesmas yang beroperasi. Tiga rumah sakit yang dimiliki ialah RS Jemaja, RS Palmatak, dan RS Tarempa. Sedangkan untuk Puskesmas, 10 unit yang dimiliki ialah Puskesmas Tarempa, Puskesmas Letung, Puskesmas Palmatak, Puskesmas Siantan Tengah, Puskesmas Siantan Timur, Puskesmas Siantan Selatan, Puskesmas Jemaja Timur, Puskesmas Siantan Utara, Puskesmas Jemaja Barat, dan Puskesmas Kute Siantan. Rincian data unit pelayanan kesehatan yang beroperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4. Data Unit Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi

No	Unit Pelayanan Kesehatan	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	RSUD Tarempa	Siantan	Tarempa	-
2	RSUD Palmatak	Palmatak	-	Payalaman
3	RSUD Jemaja	Jemaja	Letung	-
4	Puskesmas Tarempa	Siantan	Tarempa	-
5	Puskesmas Letung	Jemaja	Letung	-
6	Puskesmas Palmatak	Palmatak	-	Putik
7	Puskesmas Siantan Tengah	Siantan Tengah	-	Air Asuk
8	Puskesmas Siantan Timur	Siantan Timur	-	Nyamuk
9	Puskesmas Siantan Selatan	Siantan Selatan	-	Air Bini
10	Puskesmas Jemaja Timur	Jemaja Timur	-	Ulu Maras
11	Puskesmas Siantan Utara	Siantan Utara	-	Mubur
12	Puskesmas Jemaja Barat	Jemaja Barat	-	Impol
13	Puskesmas Kute Siantan	Kute Siantan	-	Payalaman
14	Balai Perbekalan Obat, Farmasi dan Alat Kesehatan (BPFAK)	Siantan	Tarempa	-

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 2. 5. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	15%	30%	45%	60%	75%	15%	30%	45%	60%	75%	100	100	100	100	100
2	Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN (diluar ASN, TNI, POLRI, dan DPRD)	16.000	34.442	34.908	35.374	35.839	N/A	N/A	N/A	28.494	27.309	N/A	N/A	N/A	80,6	76,2
3	Persentase desa siaga aktif tahun 2016-2021	98%	98%	99%	99%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	100	100	101	101	101
4	Persentase Cakupan ASI eksklusif	43%	45%	48%	50%	53%	47,47%	36,35%	30%	21,44%	56,03%	110,4	80,8	62,5	42,9	105,7
5	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	19%	20%	22%	24%	25%	16%	9%	6%	6%	21%	82,0	42,8	26,5	24,8	86,3
6	Angka <i>annual parasite incidence</i>	7	5	4	3	2	0,85	2,61	0,56	3,56	5,54	12,1	52,2	14,0	118,7	277,0
7	Jumlah sarana pelayanan kesehatan	0	3	4	2	0	0	3	4	2	0	N/A	100	100	100	N/A



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	yang terstandarisasi															
8	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100
9	Jumlah rumah sakit yang dipenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standarisasi	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	100	100	100	100	100
10	Jumlah kemitraan yang terjalin dalam pelayanan kesehatan masyarakat	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	N/A	100	N/A	N/A	N/A
11	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	60%	65%	70%	75%	80%	63%	74%	64%	67,20%	70,20%	105,0	113,8	91,4	89,6	87,8
12	Persentase pelayanan kesehatan lansia	80%	83%	86%	90%	93%	57,70%	27,10%	35,70%	69,50%	82%	72,1	32,7	41,5	77,2	88,2
13	Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat	82%	85%	94%	98%	100%	52,57%	3,00%	20,18%	37,14%	37,14%	64,1	3,5	21,5	37,9	37,1
14	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	84%	86%	88%	89%	90%	69,60%	66,13%	82,60%	82,80%	95,60%	82,9	76,9	93,9	93,0	106,2
15	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan mengenai kesehatan	49	49	49	49	49	21	0	21	0	0	42,9	0,0	42,9	0,0	0,0



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	remaja dan lansia															
16	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi keluarga berencana	65	68	71	74	77	66	72	69	73	69	101,6	105,4	97,9	98,9	89,6

Sumber: Target bersumber dari Renstra Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021



Kabupaten Kepulauan Anambas
Provinsi Kepulauan Riau



2.3.2. Capaian Keuangan Daerah

Tabel 2. 6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DINAS KESEHATAN															
Belanja Tidak Langsung	39.924.067.464	36.662.732.376	37.842.067.860,49	39.489.912.670	42.953.392.600	35.186.767.100	35.067.193.930	37.001.769.601	39.064.208.426	41.108.530.354	0,88	0,96	0,98	0,99	0,96
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.318.282.361	21.005.213.542	20.713.070.549	26.251.397.985	23.555.212.291	15.300.063.849	16.370.615.817	19.278.057.434	21.713.658.425	21.184.775.610	0,84	0,78	0,93	0,83	0,9
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	227.460.000	519.200.000	791.700.000,00	930.300.000	765.799.944	156.580.000	358.350.000	666.900.000	843.150.000	640.553.355	0,69	0,69	0,84	0,91	0,84
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	10.736.130.000	10.362.450.000	12.519.830.000,00	13.145.640.000	13.681.604.306	9.550.566.500	8.490.913.000	11.935.293.255	10.853.838.479	12.615.296.731	0,89	0,82	0,95	0,83	0,92
Penyediaan Rutinitas Perkantoran	7.354.692.361	2.364.156.542	1.944.872.000,00	2.113.506.092	1.725.709.500	5.592.917.349	2.099.722.210	1.865.834.387	1.949.543.193	1.638.590.394	0,76	0,89	0,96	0,92	0,95
Penyediaan Rutinitas	-	1.324.374.000	822.419.916,00	673.321.000	497.791.500	-	827.812.905	760.994.146	526.602.119	404.519.450	N/A	0,63	0,93	0,78	0,81



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perkantoran Puskesmas Tarempa															
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Letung	-	473.504.000	395.650.000,00	270.400.000	323.755.000	-	394.989.190	388.716.209	254.319.700	313.585.000	N/A	0,83	0,98	0,94	0,97
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Palmatak	-	551.654.000	425.800.000,00	508.800.000	478.925.000	-	417.562.316	424.541.854	506.182.250	478.633.500	N/A	0,76	1	0,99	1
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Tengah	-	424.104.000	318.501.200,00	293.467.495	362.430.000	-	324.302.800	291.729.650	288.520.495	326.740.500	N/A	0,76	0,92	0,98	0,9
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Timur	-	387.154.000	398.573.600,00	372.685.000	252.895.300	-	254.382.200	324.761.850	327.333.580	232.930.000	N/A	0,66	0,81	0,88	0,92
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas	-	393.774.000	264.920.000,00	244.920.000	225.000.500	-	103.813.300	224.776.780	232.004.854	219.877.270	N/A	0,26	0,85	0,95	0,98



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Siantan Selatan															
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Jemaja Timur	-	213.614.000	185.760.000,00	498.760.000	466.279.000	-	151.182.700	120.825.315	438.324.423	377.878.574	N/A	0,71	0,65	0,88	0,81
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit	-	3.633.575.000	2.311.343.833,00	-	-	-	2.591.792.596	1.946.908.533	-	-	N/A	0,71	0,84	N/A	N/A
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Instalasi Farmasi	-	99.700.000	111.700.000,00	208.700.000	209.670.443	-	99.275.400	105.319.300	201.755.413	203.295.709	N/A	1	0,94	0,97	0,97
Penyediaan Jasa Kalibrasi	-	257.954.000	222.000.000,00	1.119.848.500	-	-	256.517.200	221.456.155	281.989.738	-	N/A	0,99	1	0,25	N/A
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak	-	-	-	1.912.981.000	1.361.773.200	-	-	-	1.553.334.736	1.310.812.341	N/A	N/A	N/A	0,81	0,96
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit	-	-	-	1.130.864.155	1.135.264.155	-	-	-	1.016.934.466	1.045.427.186	N/A	N/A	N/A	0,9	0,92



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Umum Daerah Jemaja															
Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa	-	-	-	2.827.204.743	2.068.314.443	-	-	-	2.439.824.979	1.376.635.600	N/A	N/A	N/A	0,86	0,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	7.290.074.700	3.867.000.000	5.102.000.000,00	5.682.400.000	7.249.000.000	3.494.063.235	3.183.350.761	4.168.000.000	4.789.401.200	4.587.575.000	0,48	0,82	0,82	0,84	0,63
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.038.056.600	8.804.507.000	8.278.221.541	11.942.935.665	10.746.097.700	12.107.799.585	7.937.054.230	7.947.180.762	11.107.768.431	9.109.860.502	0,93	0,9	0,96	0,93	0,85
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.152.706.600	3.713.600.000	2.987.238.541,00	4.293.540.000	5.999.066.700	7.129.631.380	3.575.937.356	2.984.526.042	4.128.590.249	5.173.651.356	1	0,96	1	0,96	0,86
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	5.885.350.000	5.000.000.000	5.200.076.000,00	7.509.109.665	4.691.716.000	4.978.168.205	4.284.240.124	4.875.102.020	6.843.519.629	3.881.196.146	0,85	0,86	0,94	0,91	0,83
Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	-	90.907.000	90.907.000,00	140.286.000	55.315.000	-	76.876.750	87.552.700	135.658.553	55.013.000	N/A	0,85	0,96	0,97	0,99



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Non Fisik)															
Pelatihan Penyusunan Formularium Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Keluarga Berencana	-	1.560.225.000	4.182.490.388	3.519.284.900	3.748.494.000	-	1.344.526.643	3.269.816.831	2.905.982.462	2.508.181.476	N/A	0,86	0,78	0,83	0,67
Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga Berencana (DAK)	-	964.000.000	2.204.000.000,00	1.378.545.900	1.530.500.000	-	902.452.243	2.031.920.233	1.372.182.762	1.391.168.773	N/A	0,94	0,92	1	0,91
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	-	339.800.000	1.817.770.000,00	1.940.889.000	1.817.994.000	-	186.226.400	1.084.075.260	1.336.511.700	883.494.439	N/A	0,55	0,6	0,69	0,49
Pencanangan Sekaligus Terbentuknya Kampung KB di Kabupaten Kepulauan Anambas	-	256.425.000	-	-	-	-	255.848.000	-	-	-	N/A	1	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelatihan Teknis Tribina dan UPPKS	-	-	90.720.388,00	-	-	-	-	90.230.388	-	-	N/A	N/A	0,99	N/A	N/A
Pemutakhiran Data Keluarga	-	-	70.000.000,00	-	400.000.000	-	-	63.590.950	-	233.518.264	N/A	N/A	0,91	N/A	0,58
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan KB	-	-	-	199.850.000	-	-	-	-	197.288.000	-	N/A	N/A	N/A	0,99	N/A
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.946.654.849	12.706.021.376	17.491.018.562	24.565.736.907	23.830.372.079	9.714.387.608	10.244.596.053	15.883.262.006	21.983.579.239	22.105.316.077	0,7	0,81	0,91	0,89	0,93
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	10.063.611.375	4.779.000.000	8.250.155.000,00	11.316.245.000	12.172.686.214	9.197.743.508	4.107.093.920	8.057.376.245	10.680.701.310	11.857.352.769	0,91	0,86	0,98	0,94	0,97
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	1.558.449.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelayanan Penyakit Tidak Menular	50.000.000	179.000.000	103.750.000,00	69.850.000	182.999.000	36.560.750	178.507.600	97.651.655	67.270.655	181.007.885	0,73	1	0,94	0,96	0,99
Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi	900.000.000	25.000.000	200.000.000,00	81.000.000	97.500.000	136.557.600	18.340.000	127.352.000	-	49.288.400	0,15	0,73	0,64	0	0,51



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	-	-	214.770.000,00	373.000.000	72.907.000	-	-	169.201.009	350.070.757	72.487.600	N/A	N/A	0,79	0,94	0,99
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarempa	-	999.586.748	1.018.366.361,00	891.765.666	769.843.405	-	879.352.110	641.620.555	655.966.679	467.227.595	N/A	0,88	0,63	0,74	0,61
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Letung	-	471.657.465	313.364.600,00	514.168.164	275.000.000	-	422.894.350	288.552.400	432.430.200	215.741.430	N/A	0,9	0,92	0,84	0,78
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Palmatak	-	854.034.176	902.386.829,00	856.120.200	845.000.000	-	809.068.640	839.258.586	816.624.554	828.351.050	N/A	0,95	0,93	0,95	0,98
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Tengah	-	241.568.253	206.708.128,00	372.751.440	190.000.000	-	163.560.055	162.304.066	248.920.050	184.742.040	N/A	0,68	0,79	0,67	0,97



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Timur	-	243.998.425	201.101.749,00	331.320.000	250.000.000	-	212.463.245	171.559.433	258.367.412	248.407.620	N/A	0,87	0,85	0,78	0,99
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Selatan	-	167.388.158	233.696.715,00	260.452.517	220.000.000	-	135.292.038	162.304.066	166.276.950	203.656.580	N/A	0,81	0,69	0,64	0,93
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jemaja Timur	-	245.283.649	149.953.180,00	227.688.400	155.000.000	-	161.981.945	121.949.500	165.398.800	128.707.440	N/A	0,66	0,81	0,73	0,83
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	-	664.062.500	-	-	-	-	581.993.500	-	-	-	N/A	0,88	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)	-	683.926.000	623.361.500,00	798.000.000	1.385.386.000		244.684.000	491.397.191	744.460.846	1.372.221.088	N/A	0,36	0,79	0,93	0,99



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Klaim INA-CBG's	-	475.000.000	500.000.000,00	3.104.375.520	2.239.820.400	-	95.838.200	445.159.200	2.435.889.500	1.592.000.750	N/A	0,2	0,89	0,78	0,71
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Jiwa	-	-	47.500.000,00	-	-	-	-	46.563.000	-	-	N/A	N/A	0,98	N/A	N/A
Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Daerah Sulit dan Terpencil	-	-	182.096.000,00	100.000.000	128.466.060	-	-	181.049.230	98.334.135	128.016.060	N/A	N/A	0,99	0,98	1
Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA	-	-	58.400.000,00	-	-	-	-	33.169.000	-	-	N/A	N/A	0,57	N/A	N/A
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tarempa (DAK)	182.821.002	385.225.002	608.577.178,00	689.668.678	750.000.000	47.620.000	313.393.500	457.874.670	598.481.070	656.761.000	0,26	0,81	0,75	0,87	0,88
Penyediaan Bantuan Operasional	208.938.288	258.884.500	524.351.297,00	824.351.297	775.000.000	5.386.000	251.012.500	427.590.400	729.558.350	654.164.200	0,03	0,97	0,82	0,89	0,84



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kesehatan (BOK) Puskesmas Letung (DAK)															
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palatak (DAK)	235.055.574	413.731.000	689.909.025,00	842.409.025	872.000.000	50.850.000	374.602.000	689.341.700	842.048.100	852.107.650	0,22	0,91	1	1	0,98
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Tengah (DAK)	169.762.359	292.125.000	608.581.250,00	738.581.250	650.000.000	43.760.000	282.070.500	585.108.950	738.441.321	649.821.950	0,26	0,97	0,96	1	1
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Timur (DAK)	169.762.359	358.625.000	666.643.750,00	754.143.750	660.000.000	96.240.000	355.421.800	665.935.750	728.542.870	659.854.270	0,57	0,99	1	0,97	1
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	182.821.002	382.850.000	496.096.000,00	628.596.000	665.000.000	30.131.750	150.960.850	394.531.200	466.779.130	629.979.200	0,16	0,39	0,8	0,74	0,95



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Puskesmas Siantan Selatan (DAK)															
Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jemaja Timur (DAK)	156.703.716	451.250.000	691.250.000,00	791.250.000	473.764.000	5.386.000	410.211.300	626.412.200	759.016.550	473.419.500	0,03	0,91	0,91	0,96	1
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)	68.729.700	133.825.500	-	-	-	64.152.000	95.854.000	-	-	-	0,93	0,72	N/A	N/A	N/A
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000	1.491.593.000	597.825.000	755.446.560	-	259.735.476	1.337.038.240	330.249.276	721.122.265	-	0,26	0,9	0,55	0,95	N/A
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	-	155.975.000	-	-	-	-	146.844.120	-	-	-	N/A	0,94	N/A	N/A	N/A
Peningkatan Pendidikan	-	106.875.000	-	-	-	-	102.588.100	-	-	-	N/A	0,96	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tenaga Penyuluh Kesehatan															
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	300.000.000	355.162.500	352.125.000,00	193.267.560	-	259.735.476	327.307.098	94.375.000	192.522.665	-	0,87	0,92	0,27	1	N/A
Lomba Sekolah Sehat	230.000.000	91.725.000	-	-	-	-	89.947.294	-	-	-	0	0,98	N/A	N/A	N/A
Pelatihan Dokter Kecil	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelatihan TOT Desa Siaga	240.000.000	203.875.000	-	-	-	-	151.070.228	-	-	-	0	0,74	N/A	N/A	N/A
Penjaringan Anak Sekolah	-	33.200.000	-	-	-	-	33.053.100	-	-	-	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Pelatihan Kader Posyandu	-	361.380.500	-	386.329.000	-	-	306.997.600	-	353.751.894	-	N/A	0,85	N/A	0,92	N/A
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-	183.400.000	-	-	-	-	179.230.700	-	-	-	N/A	0,98	N/A	N/A	N/A
Pembentukan Pos UKK	-	-	72.300.000,00	-	-	-	-	63.192.145	-	-	N/A	N/A	0,87	N/A	N/A
Kampanye Kesehatan dalam Rangka Germas	-	-	173.400.000,00	175.850.000	-	-	-	172.682.131	174.847.706	-	N/A	N/A	1	0,99	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)															
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	150.820.000	304.018.000	156.984.100	53.822.530	78.602.000	-	274.273.730	156.072.055	53.822.530	77.275.061	0	0,9	0,99	1	0,98
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	-	-	-	53.822.530	-	-	-	-	53.822.530	-	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Pelatihan Konselor Air Susu Ibu (ASI)	150.820.000	135.658.000	-	-	-	-	135.655.600	-	-	-	0	1	N/A	N/A	N/A
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium	-	-	-	-	78.602.000	-	-	-	-	77.275.061	N/A	N/A	N/A	N/A	0,98



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya															
Bulan Penimbangan Balita	-	168.360.000	-		-		138.618.130	-	-	-	N/A	0,82	N/A	N/A	N/A
Upaya Peningkatan Cakupan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif	-	-	50.811.600,00	-	-	-	-	50.808.600	-	-	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Peningkatan Perilaku Sadar Gizi	-	-	106.172.500,00	-	-	-	-	105.263.455	-	-	N/A	N/A	0,99	N/A	N/A
Pelatihan Antropometri	141.625.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	149.950.000	118.970.000	197.907.500	90.473.000	-	120.943.800	118.713.829	185.598.300	89.058.630	-	0,81	1	0,94	0,98	N/A
Pembinaan Teknis Penyelenggaraan	-	-	211.095.685,00	249.000.000	35.231.700	-	-	206.298.012	243.425.687	35.226.950	N/A	N/A	0,98	0,98	1



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KKS di daerah Binaan															
Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman	49.950.000	69.970.000	76.152.000,00	90.473.000	-	49.418.000	69.802.500	63.990.500	89.058.630	-	0,99	1	0,84	0,98	N/A
Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100.000.000	49.000.000	121.755.500,00	-	-	71.525.800	48.911.329	121.607.800	-	-	0,72	1	1	N/A	N/A
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	790.114.000	589.200.000	877.917.500	300.000.000	71.907.762	544.909.470	582.588.890	700.546.470	273.809.092	65.577.762	0,69	0,99	0,8	0,91	0,91
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	28.950.000	-	-	-	-	28.950.000	-	-	-	-	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Pencegahan Penularan Penyakit	-	70.000.000	70.000.000,00	50.000.000	5.490.000	-	66.202.000	60.116.500	48.685.400	5.490.000	N/A	0,95	0,86	0,97	1



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Endemik Malaria															
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik	42.000.000	-	-	-	-	34.123.500	-	-	-	-	0,81	N/A	N/A	N/A	N/A
Kampanye dan Introduksi Measles dan Rubella (MR)	-	-	397.617.500,00	-	-	-	-	310.456.580	-	-	N/A	N/A	0,78	N/A	N/A
Peningkatan Imunisasi	57.400.000	97.700.000	75.000.000,00	50.000.000	3.100.000	49.749.000	97.564.000	72.331.000	42.465.092	3.100.000	0,87	1	0,96	0,85	1
Pertemuan Penguatan Jejaring Pelayanan TB Kabupaten	-	-	70.300.000,00	-	-	-	-	51.969.000	-	-	N/A	N/A	0,74	N/A	N/A
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	54.000.000	53.000.000	53.000.000,00	50.000.000	28.014.762	22.335.000	52.655.000	37.204.500	46.689.000	28.014.762	0,41	0,99	0,7	0,93	1
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)	150.000.000	-	-	-	-	136.298.000	-	-	-	-	0,91	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelayanan	57.000.000	62.000.000	62.000.000,00	50.000.000	21.600.000	48.672.000	61.818.000	59.310.000	49.839.600	15.600.000	0,85	1	0,96	1	0,72



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji															
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	117.400.000	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000	7.263.000	110.332.250	49.854.390	41.858.390	38.164.000	6.933.000	0,94	1	0,84	0,76	0,95
Pertemuan Internasional Standar Tuberculosis untuk Tim DOTS TB	164.500.000	156.500.000	-	-	-	6.712.000	155.394.700	-	-	-	0,04	0,99	N/A	N/A	N/A
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB	52.000.000	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000	6.440.000	43.068.420	49.758.000	37.214.500	47.966.000	6.440.000	0,83	1	0,74	0,96	1
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta	66.864.000	50.000.000	50.000.000,00	-	-	64.669.300	49.342.800	30.086.000	-	-	0,97	0,99	0,6	N/A	N/A
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	1.183.404.000	2.391.670.000	972.982.000	419.130.000	-	924.944.341	1.657.814.302	827.225.642	-	N/A	0,78	0,69	0,85	0



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	-	529.938.000	1.250.000.000,00	328.182.000	419.130.000	-	410.471.200	1.021.554.496	307.327.142	-	N/A	0,77	0,82	0,94	0
Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rumah Sakit	-	515.466.000	-	-	-	-	388.515.541	-	-	-	N/A	0,75	N/A	N/A	N/A
Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah SOTK Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat Kerja Kesehatan Daerah	-	138.000.000	-	-	-	-	125.957.600	-	-	-	N/A	0,91	N/A	N/A	N/A
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	-	-	269.425.000,00	-	-	-	-	145.696.500	-	-	N/A	N/A	0,54	N/A	N/A
Persiapan Akreditasi	-	-	600.000.000,00	644.800.000	-	-	-	299.949.046	519.898.500	-	N/A	N/A	0,5	0,81	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rumah Sakit (DAK Non Fisik)															
Monev Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	-	-	195.000.000,00	-	-	-	-	124.125.260	-	-	N/A	N/A	0,64	N/A	N/A
Advokasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	-	-	77.245.000,00	-	-	-	-	66.489.000	-	-	N/A	N/A	0,86	N/A	N/A
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	400.000.000	-	-	-	-	216.894.500	-	-	-	-	0,54	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Dokumen Environmental Health Risk	250.000.000	-	-	-	-	216.894.500	-	-	-	-	0,87	N/A	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Assessment (EHRA)															
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12.624.362.023	20.261.931.760	5.278.249.123	68.193.680.132	33.740.640.368	4.006.457.730	15.788.521.591	5.149.376.163	49.091.926.084	32.768.343.632	0,32	0,78	0,98	0,72	0,97
Pembangunan Puskesmas	-	-	-	49.348.355.453	28.255.440.868	-	-	-	34.988.405.682	27.426.646.136	N/A	N/A	N/A	0,71	0,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Perairan	-	299.900.000	-	-	-	-	78.532.913	-	-	-	N/A	0,26	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	-	502.107.100	-	-	-	-	495.957.343	-	-	-	N/A	0,99	N/A	N/A	N/A
Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	623.265.000	-	499.873.236	140.648.000		459.093.000	-	498.470.036	116.788.500	N/A	0,74	N/A	1	0,83



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Instalasi Farmasi															
Pembangunan Puskesmas Pembantu	-	-	1.656.002.716	211.049.000	190.000.000	-	-	1.655.558.916	210.249.000	188.807.000	N/A	N/A	1	1	0,99
Pembangunan Posyandu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	5.308.331.023	14.955.703.000	-	11.630.212.991	2.206.576.000	-	11.681.296.489		9.008.469.050	2.146.645.226	0	0,78	N/A	0,77	0,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	564.822.000	1.880.956.660	1.020.010.679	1.724.823.834	-	341.142.830	1.562.973.435	992.295.679	1.618.757.186	-	0,6	0,83	0,97	0,94	N/A
Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	-	-	32.000.000	-	-	-	-	31.820.000	-	-	N/A	N/A	0,99	N/A	N/A
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	-	-	263.735.000	-	15.840.000	-	-	259.296.298	-	15.777.000	N/A	N/A	0,98	N/A	1



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	321.432.000	-	-	-	-	192.611.800	-	-	-	-	0,6	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	3.212.000.000	2.000.000.000	2.306.500.728	4.779.365.618	2.932.135.500	560.181.100	1.510.668.411	2.210.405.270	2.767.575.130,00	2.873.679.770	0,17	0,76	0,96	0,58	0,98
Pembangunan Puskesmas Pembantu	2.179.599.200	-	-	-	-	2.034.582.200	-	-	-	-	0,93	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	63.988.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan Posyandu	375.464.000	-	-	-	-	307.491.000	-	-	-	-	0,82	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Sarana dan Prasarana	598.725.000	-	-	-	-	570.448.800	-	-	-	-	0,95	N/A	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Posyandu															
Program															
Pengadaan,															
Peningkatan															
Sarana dan															
Prasarana															
Rumah															
Sakit/Rumah	-	4.328.392.795	4.391.484.368	8.983.377.922	3.340.700.000	-	4.179.643.924	4.389.447.963	8.671.361.204	3.289.631.229	N/A	0,97	1	0,97	0,98
Sakit															
Jiwa/Rumah															
Sakit Paru-															
Paru/Rumah															
Sakit Mata															
Pengadaan Alat-															
Alat Kesehatan	-	78.350.000	-	5.479.249.135	-	-	75.470.000	-	5.441.401.813	-	N/A	0,96	N/A	0,99	N/A
Rumah Sakit															
Pengadaan															
Sarana dan	-	2.203.450.000	4.391.484.368	3.504.128.787	3.340.700.000		2.200.529.500	4.389.447.963	3.229.959.391	3.289.631.229	N/A	1	1	0,92	0,98
Prasarana															
Rumah Sakit															
Pengadaan															
Sarana dan	-	2.046.592.795	-	-	-	-	1.903.644.424	-	-	-	N/A	0,93	N/A	N/A	N/A
Prasarana															
Rumah Sakit															
(SILPA DAK)															



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	8.633.645.000	3.129.630.000	8.034.112.550	10.998.337.113	4.630.426.409	-	2.969.850.081	7.915.775.083	10.841.748.765	4.507.769.839	0	0,95	0,99	0,99	0,97
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	232.747.500	-	-	-	-	211.424.300	-	-	-	N/A	0,91	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan Kemitraan Dunia Usaha Yang Memanfaatkan CSR Untuk Program Kesehatan	-	63.535.000	-	-	-	-	62.978.500	-	-	-	N/A	0,99	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Penggunaan Dana Desa untuk Kesehatan (UKBM)	-	169.212.500	-	-	-	-	148.445.800	-	-	-	N/A	0,88	N/A	N/A	N/A
Program Pengawasan Dan Pengendalian	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	59.044.187	-	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kesehatan Makanan															
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	59.044.187	-	N/A	N/A	N/A	0,98	N/A
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	904.677.000	154.280.000	-	-	-	677.540.600	119.594.000	-	-	-	0,75	0,78	N/A	N/A	N/A
Manajemen Terpadu Balita Sakit	-	-	88.370.835	-	-	-	-	88.034.555	-	-	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang	177.900.000	154.280.000	-	-	-	-	119.594.000	-	-	-	0	0,78	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita	726.777.000	-	-	-	-	677.540.600	-	-	-	-	0,93	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Lansia	848.055.000	-	110.967.500	-	-	522.795.000	-	92.421.630	-	-	0,62	N/A	0,83	N/A	N/A
Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR)	-	250.000.000	-	-	-	-	249.714.460	-	-	-	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	125.725.000	-	110.967.500	-	-	-	-	92.421.630	-	-	0	N/A	0,83	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelatihan Petugas Program Lansia	147.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemberian Makan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia	574.400.000	-	-	-	-	522.795.000	-	-	-	-	0,91	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	97.720.000	74.723.500	-	-	-	97.591.000	74.723.500	-	-	N/A	1	1	N/A	N/A
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	-	97.720.000	74.723.500	-	-	-	97.591.000	74.723.500	-	-	N/A	1	1	N/A	N/A
Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	-	60.000.000	117.500.000	-	-	-	59.555.000	102.660.800	-	-	N/A	0,99	0,87	N/A	N/A
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan	-	60.000.000	40.000.000	-	-	-	59.555.000	39.837.700	-	-	N/A	0,99	1	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Makanan Hasil Industri															
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Kompeten dalam Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	77.500.000	-	-	-	-	62.823.100	-	-	N/A	N/A	0,81	N/A	N/A
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.181.055.000	444.297.000	1.510.091.000	406.000.000	595.372.000	526.978.900	265.925.066	590.338.901	350.849.300	543.137.900	0,45	0,6	0,39	0,86	0,91
Audit Maternal Perinatal	-	208.935.000	80.404.300	89.677.500	-	-	110.055.600	78.276.800	87.944.736	-	N/A	0,53	0,97	0,98	N/A
Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun	-	317.955.000	-	-	-	-	215.373.325	-	-	-	N/A	0,68	N/A	N/A	N/A
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelatihan Program Pengkajian Kematian	131.000.000	-	-	-	-	102.372.500	-	-	-	-	0,78	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK)	592.420.000	444.297.000	1.510.091.000,00	406.000.000	595.372.000	129.269.600	265.925.066	590.338.901	350.849.300	543.137.900	0,22	0,6	0,39	0,86	0,91
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil	332.635.000	-	-	-	-	295.336.800	-	-	-	-	0,89	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	384.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A



Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit	384.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Isu-isu yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana beserta jajarannya dipengaruhi oleh berbagai **faktor eksternal yang dapat ditinjau dari pilar sumber daya manusia, organisasi, serta fasilitas pelayanan kesehatan**. Dari setiap pilar tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kinerja layanan. Identifikasi peluang dan tantangan tersebut selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut untuk meningkatkan potensi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peluang diidentifikasi dari keadaan eksternal positif yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tujuan organisasi apabila organisasi tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik. Sedangkan tantangan diidentifikasi dari kendala-kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi dan dapat memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi apabila organisasi tersebut berhasil mengatasinya. Analisis peluang dan tantangan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terutama dalam melaksanakan perencanaan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat terjadi di masa depan dengan memproyeksikan pengembangan pelayanan berdasarkan kajian pengalaman masa lalu serta didukung oleh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana pada saat ini.

Berikut hasil identifikasi **peluang** yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana:

Sumber Daya Manusia

1. Masyarakat semakin paham dengan kesehatan individu dan keluarga seiring dengan kemajuan arus informasi;
2. Banyak anak daerah yang dapat diberdayakan dalam mendukung pelayanan kesehatan dan PPKB di KKA khususnya anak daerah yang memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan dan PPKB;
3. Banyaknya seminar virtual dengan biaya lebih efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan dan PPKB;
4. Adanya dukungan pemerintah dari sisi penambahan dan pengembangan SDM Kesehatan yang berkualitas, penyediaan sarana

dan prasarana yang memadai, serta diberlakukannya kebijakan bagi CPNS untuk mengabdikan selama 10 tahun sebagai PNS di kabupaten/kota (mulai Tahun 2020); dan

5. Pemerintah Daerah memiliki *networking* dengan ahli dan institusi pelatihan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

Organisasi

1. Terbukanya kesempatan yang luas kepada Pemerintah/Swasta/Masyarakat untuk melakukan kerja sama dalam mendukung pelayanan bidang kesehatan dan PPKB (contoh: membentuk organisasi atau komisi yang mendukung pelayanan Kesehatan, menjalin kerja sama pengendalian penduduk dan KB dengan institusi pendidikan formal dan informal, dan sebagainya);
2. Adanya komitmen peraturan perundangan-undangan dan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mendukung pelaksanaan urusan kesehatan dan PPKB;
3. Tersedianya pengorganisasian dari level kabupaten, provinsi, dan pusat terkait regulasi kesehatan;
4. Kualitas pengawasan, kestabilan regulasi, dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan PPKB serta distribusi alat dan obat kontrasepsi oleh provinsi dan pusat yang sudah cukup baik; dan
5. Banyak pihak yang masih bisa dilibatkan dalam penanganan kesehatan khususnya KB (contoh: pihak Swasta/LSM/Ormas).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Adanya potensi pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan dan PPKB;
2. Pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan desa siaga aktif yang sudah optimal; dan
3. Peningkatan pelayanan PPKB didukung oleh adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi, mudahnya akses arus informasi sehingga memudahkan promosi program kegiatan PPKB, serta Pasangan Usia Subur (PUS) sudah benar-benar memahami arti pentingnya mengikuti program KB.

Berikut hasil identifikasi **tantangan** yang dimiliki Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana:

Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan jumlah, mutu kinerja, dan kualitas SDM di bidang Kesehatan dan PPKB yang andal, baik sektor pemerintah maupun swasta di KKA, belum dilakukan dengan optimal;
2. Kurang optimalnya kinerja manajemen SDM di bidang Kesehatan dan PPKB baik dalam menangani mekanisme perekrutan SDM (kurang menarik minat SDM di bidang kesehatan dan PPKB untuk ditempatkan di KKA), pemerataan SDM (kurang sesuai dengan kebutuhan daerah), insentif (belum mengimbangi beban dan resiko kerja, biaya hidup yang tinggi, serta kondisi geografis di daerah terpencil), penegakan kedisiplinan pegawai, serta ketersediaan SDM dan petugas lini lapangan (terhambat oleh adanya SDM yang absen akibat terpapar COVID-19, peraturan mengenai perpindahan nakes masih cukup longgar, serta sulitnya mencari pengganti nakes) sehingga perlu pengetatan kebijakan komitmen pekerja; dan
3. Banyaknya posisi manajerial yang diduduki SDM serta program-program kerja yang dimiliki cukup banyak sehingga menyebabkan kinerja nakes pada pelayanan kesehatan tidak optimal.

Organisasi

1. Kurangnya dukungan dan koordinasi antar OPD dengan dinas kesehatan untuk mendukung program-program pelayanan kesehatan dan PPKB karena belum terintegrasinya antar OPD;
2. Penggunaan IT dalam pelayanan kesehatan dan PPKB belum optimal khususnya antara Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit belum tersistem dengan baik (khususnya dalam bidang PPKB) serta kurang responsifnya sistem pelaporan kasus untuk penanganan cepat tanggap;
3. Kurang optimalnya peran pemerintah dalam mengawasi sarpras, farmasi, dan alat kesehatan (alkes), melaksanakan mekanisme perizinan dan penegakan aturan terkait IPAL (instalasi Pengelolaan Air Limbah), serta penyusunan dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pengawasan Lingkungan) dan belum adanya mekanisme tersendiri untuk pengelolaan limbah medis;
4. Kurangnya kinerja manajemen organisasi yang ditandai dengan birokrasi pelayanan kesehatan yang belum efektif dan efisien, serta intervensi Permasalahan dan Perencanaan Kesehatan belum berdasarkan *data driven policy*;
5. Masih kurangnya jumlah, kemampuan, dan pemahaman SDM dalam cara penggunaan alkes, perencanaan persediaan obat-obatan (khususnya yang memiliki rentang waktu kadaluarsa yang cepat), serta

memahami aturan yang ada sehingga menghambat optimalisasi potensi organisasi;

6. Upaya mencari CSR belum dilakukan secara optimal karena mekanisme CSR yang hanya difasilitasi melalui 1 pintu Pemerintah Daerah sehingga sulit bagi organisasi kesehatan dan PPKB untuk aktif mencari kerja sama CSR; dan
7. Sosialisasi, edukasi terhadap kesehatan reproduksi dan KB untuk usia remaja masih belum terlaksana dengan optimal.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Belum ada *grand design* dan kajian untuk peningkatan mutu layanan kesehatan, belum optimalnya pengembangan inovasi fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan kesehatan berbasis SPM, dan kurangnya partisipasi *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan sosialisasi kesehatan;
2. Perlunya peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan PPKB antar wilayah dan daerah di KKA karena saat ini pelayanan kesehatan dan PPKB terkendala faktor geografis: (1) Terletak di daerah kepulauan dengan jarak yang jauh; (2) Cuaca ekstrim; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana angkutan laut reguler untuk menjangkau ke semua fasilitas kesehatan; (4) Terbatasnya kendaraan darat khususnya di daerah perbatasan sehingga menyebabkan kesulitan dalam merujuk pasien dari FKTP ke pusat rujukan;
3. Perlunya dukungan sarana dan prasarana, serta alat kesehatan dari pemerintah provinsi dan pusat;
4. Kurang optimalnya aktivitas operasional pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dan PPKB seperti belum terlaksananya pengadaan rumah sakit apung dan puskesmas keliling, adanya kendala jaringan dan listrik, obat yang digunakan oleh antar dokter berbeda-beda sehingga stok menjadi lebih sulit, pengetahuan tenaga medis dalam penggunaan peralatan medis yang modern belum cukup baik, dan masih terdapat kesulitan dalam mendapatkan akseptor MOP (Metode Operasi Pria);
5. Cakupan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat KKA belum optimal (terutama di daerah terpencil) yang ditandai dengan belum seluruh masyarakat memiliki kartu BPJS aktif;
6. Masih kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam mengoptimalkan program-program kesehatan seperti kesadaran masyarakat dalam program PPKB, pencegahan penyakit serta berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah, pengetahuan masyarakat yang lebih mempercayai pengobatan tradisional, dan masih



belum optimalnya keterlibatan tenaga kesehatan tradisional dalam mendukung pelayanan kesehatan dan PPKB di KKA;

7. Terhambatnya pelaksanaan program dan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan dan PPKB yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti Pandemi Covid-19, perubahan iklim global dan perubahan ekologis lokal yang berdampak pada peningkatan potensi penyakit di KKA; dan
8. Belum optimalnya pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi dikarenakan kesadaran masyarakat yang belum cukup baik, adanya rasa takut akan dampak atau efek samping imunisasi dan vaksinasi, serta kurangnya partisipasi berbagai pihak dalam pelaksanaan sosialisasi kesehatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis hasil capaian kinerja selama tahun 2016-2020 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluangnya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Kepulauan Anambas memetakan 7 permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan pencapaian kinerja untuk melayani masyarakat, yaitu:

1. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan dan keluarga berencana;
2. Infrastruktur dan sarana transportasi penunjang pelayanan kesehatan yang belum memadai;
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang kesehatan;
5. Keterbatasan anggaran program kesehatan;
6. Kinerja di bidang kesehatan keluarga yang belum optimal;
7. Kinerja di bidang kesehatan lingkungan yang belum optimal; dan
8. Pandemi COVID – 19.

Ketujuh masalah pokok tersebut mencakup masalah dan akar masalah yang dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan dan keluarga berencana	Belum optimalnya kapasitas penanganan kesehatan dan layanan program keluarga berencana	Ketersediaan prasarana kesehatan yang belum memadai di fasilitas kesehatan, baik di tingkat rumah sakit hingga tingkat puskesmas, khususnya untuk menangani pasien kritis
		Pengadaan alat yang belum tentu sesuai dengan kapasitas SDM yang dimiliki mengakibatkan banyaknya alat yang sudah dibeli tidak terpakai.
		Sistem pelaporan kasus untuk cepat tanggap



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penanganan belum optimal
		Belum ada fasilitas berupa tempat khusus penanganan pasien ODGJ
		Sarana dan peralatan penanganan persalinan belum memadai di tingkat pustu
		Perawatan/ <i>maintenance</i> peralatan kesehatan belum optimal
		Belum meratanya fasilitas klinik keluarga berencana
Infrastruktur dan sarana transportasi penunjang pelayanan kesehatan yang belum memadai	Belum optimalnya kecepatan penanganan terhadap penyakit menular maupun tidak menular, pasien kritis, dan pertolongan persalinan	Faktor geografis yang sulit dijangkau
		Kondisi cuaca yang tidak menentu
		Ketersediaan transportasi laut yang sangat terbatas
Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Sistem pendeteksian atau screening penyakit tidak menular di KKA masih belum berjalan optimal.	Pemantauan penyakit tidak menular oleh tenaga kesehatan belum optimal karena bergantung pada partisipasi aktif melalui pengecekan dan laporan dari masyarakat.
	Keterbatasan ketersediaan obat	Kurangnya pengawasan dari instansi pemerintah untuk pembinaan terhadap sarana farmasi dan alkes
		Obat yang tersedia untuk dibeli terkadang memiliki rentang waktu kadaluarsa yang relatif cepat
	Belum optimalnya penanganan penyakit menular	Pengobatan TB hingga selesai dan sembuh masih belum optimal
		Kasus kematian akibat malaria di KKA secara persentase masih tinggi
		Sistem <i>screening</i> HIV masih belum optimal
Keterbatasan Sumber Daya	Kualitas SDM kesehatan yang relatif rendah	Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Manusia yang berkualitas di bidang kesehatan		Keterbatasan jumlah dokter spesialis, terapis, ahli anestesi, dan ahli epidemiologi
		Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di wilayah terpencil
		Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi
		Pemerataan persebaran SDM Kesehatan Kab. Kep. Anambas yang belum optimal
		Rangkap jabatan tenaga kesehatan sekaligus tenaga manajerial di fasilitas kesehatan dapat menyebabkan kualitas kinerja menurun
		Proses rekrutmen tenaga non-medis yang belum terlaksana
		Kurangnya minat tenaga kesehatan dari luar daerah untuk berkarir di Kab. Kep. Anambas
Keterbatasan anggaran pemerintah daerah di bidang kesehatan	Wacana pemerintah untuk memberikan sarana prasarana, alat kesehatan, dan fasilitas untuk menunjang SDM kesehatan belum terlaksana	Kurangnya komitmen Pemda untuk merealisasikan anggaran yang direncanakan (baik melalui DAK maupun APBD) di bidang kesehatan
	Belum optimalnya penanganan isu - isu terkait SPM kesehatan	Kurangnya sarana dan fasilitas kesehatan pendukung yang dibutuhkan karena anggaran belum mencukupi
	Minimnya penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	Program terkait peningkatan kapasitas SDM Kesehatan belum menjadi prioritas anggaran
	Belum optimalnya alokasi pendanaan untuk pengentasan Malaria, TB, dan HIV	Pendanaan penyakit menular masih digabungkan dengan pendanaan penyakit tidak menular



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengembangan rumah sakit tipe D dan kelengkapan fasilitas, layanan, dan SDM kesehatan rumah sakit terhambat	Rumah sakit di Kab. Kep. Anambas masih menggunakan anggaran APBD, belum menjadi BLUD
Kinerja di bidang kesehatan keluarga yang belum optimal	Masih terdapat kasus <i>Stunting</i>	Masih rendahnya pemahaman pola asuh orang tua dan kesadaran kebersihan lingkungan masyarakat
	Masih terdapat kasus AKI	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis
	Belum optimalnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi wanita kawin 15-49 tahun	Masih rendahnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana.
	Sosialisasi dan pelaksanaan Vaksinasi dan Imunisasi di Kabupaten Kepulauan Anambas belum optimal	Kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan vaksinasi belum cukup baik
Kondisi kesehatan lingkungan yang belum optimal	Meningkatnya jumlah limbah medis akibat pandemi covid	Belum adanya mekanisme tersendiri untuk pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan masing - masing yang sudah diatur pemma
	Sulitnya mendapatkan akses air bersih dan sanitasi untuk kesehatan keluarga dan masih terdapat jamban yang belum sesuai standar	Kondisi geografis pesisir yang dikelilingi air laut menyebabkan sulit mendapat air bersih
Pandemi Covid - 19	Pelayanan kesehatan masyarakat terhambat	Banyak tenaga kesehatan terpapar Covid
		Penggunaan posyandu / puskesmas terbatas
		Kekhawatiran masyarakat untuk terpapar Covid-19 meningkat apabila datang ke fasilitas kesehatan

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Tahun 2021-2026, visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas adalah **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”**. Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam empat misi, sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Dalam hal urusan Kesehatan dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), misi yang terkait adalah yang pertama yaitu membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah dan misi ketiga yaitu Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi. Di dalam RPJMD Misi tersebut diterjemahkan ke dalam satu tujuan dan satu sasaran. Adapun tujuan yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran dari tujuan tersebut yang berkaitan langsung dengan Urusan Kesehatan serta Urusan PPKB adalah meningkatkan kualitas dan akses kesehatan dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan. Dengan demikian, Renstra Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang telah dipaparkan.

Sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, terdapat satu program unggulan (fokus pembangunan) kepala daerah yang terkait dengan Urusan Kesehatan dan PPKB, yaitu memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan. Terdapat dua penekanan penting di dalam fokus pembangunan tersebut. Pertama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun ke depan memiliki komitmen untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang tangguh. Kedua, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun ke depan

berkomitmen membangun sarana dan prasarana kesehatan yang mumpuni untuk mendukung perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026, terdapat identifikasi isu-isu di dalam bidang kesehatan dan PPKB. Identifikasi isu-isu ini dilakukan untuk dapat menetapkan arah pembangunan di bidang kesehatan dan PPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan di bidang kesehatan dan PPKB secara umum adalah kinerja kesehatan dan PPKB yang belum optimal. Adapun detail permasalahan pada bidang kesehatan dan pada bidang PPKB adalah sebagai berikut.

A. Permasalahan di Bidang Kesehatan

1. Sarana prasarana kesehatan masih relatif terbatas (termasuk ketersediaan obat – obatan dan kelengkapan alat Kesehatan).
2. Tenaga kesehatan yang terbatas dilihat dari kuantitas dan kualitas.
3. Standar pelayanan minimum kesehatan belum seluruhnya tercapai.
4. Kurangnya tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana pada saat penanganan pandemi COVID-19.
5. Masih kurangnya rumah sakit rujukan dan adanya hambatan pelayanan akibat kendala geografis.
6. Upaya preventif kesehatan masyarakat masih lemah, karena kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurang masifnya sosialisasi.
7. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki rumah sakit khusus bersalin.
8. Fasilitas apotek belum tersedia di seluruh kecamatan.
9. Jumlah kasus diare, malaria, dan TB masih relatif tinggi sehingga perlu penanganan yang lebih komprehensif untuk memperkecil risiko penularan.
10. Dalam hal kelahiran bayi, masih terdapat bayi dengan berat badan rendah dan kasus gizi kurang, serta angka (prevalensi) *stunting* yang masih relatif tinggi.

B. Permasalahan di Bidang PPKB

1. Masih rendahnya penyuluhan dan sosialisasi terkait Keluarga Berencana. Hal ini berdampak kepada kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana.
2. Jumlah klinik keluarga berencana belum tersebar secara merata di semua pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi wanita kawin 15-49 tahun masih berada di kisaran angka 75% dan masih perlu untuk dioptimalkan.

Berdasarkan pemaparan identifikasi permasalahan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2026, dapat dilihat bahwa berbagai permasalahan tersebut sudah tercakup di dalam kompilasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang ada di dalam tabel 3.1. Dalam tabel tersebut permasalahan Urusan Kesehatan dan Urusan PPKB digambarkan dengan pemaparan yang lebih detail dan lebih dalam. Adanya keterkaitan yang kuat antara permasalahan yang diidentifikasi di dalam RPJMD dan Renstra membuktikan bahwa sudah terdapat koherensi dan kohesivitas antara RPJMD dan Renstra. Dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas di bidang pelayanan kesehatan dan PPKB, terdapat berbagai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Secara umum faktor-faktor pendukung adalah sebagai berikut.

1. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Terbukanya kesempatan kerja sama yang luas antara pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan PPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Adanya payung kebijakan yang kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan PPKB baik yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan maupun dalam SDGs.
4. Pemanfaatan teknologi yang semakin massif yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan PPKB seperti seminar *online* untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan promosi program kesehatan.

Adapun faktor-faktor penghambat secara umum adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan sumber daya manusia bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keterbatasan yang dimaksud terkait dengan kecukupan jumlah tenaga kesehatan dan kecukupan kemampuan atau kapasitas tenaga kesehatan.
2. Sarana dan prasarana kesehatan di KKA belum optimal dan belum tersebar secara merata di setiap kepulauan dan kecamatan. Hal ini

berdampak pada kemudahan akses pelayanan kesehatan serta efektivitas pelayanan kesehatan.

3. Mekanisme pelayanan Kesehatan dan PPKB belum dijalankan dengan sistem yang optimal. Hal ini juga merupakan dampak langsung dari belum optimalnya dukungan dari sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kesehatan.
4. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas berdampak pada kemudahan pelayanan kesehatan dan PPKB di Anambas. Kondisi cuaca yang buruk akan menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya ke pulau-pulau yang belum memiliki sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan yang cukup.
5. Keterbatasan anggaran kesehatan berdampak pada pelayanan kesehatan dan PPKB. Kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan efisien dan efektif pada pos prioritas diharapkan mampu memberikan dampak dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan PPKB.
6. Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dan PPKB. Pelayanan kesehatan yang bersifat pertemuan langsung menjadi terhambat. Kondisi jaringan internet yang masih belum optimal menyebabkan penduduk tidak dapat memperoleh pelayanan konsultasi kesehatan secara *online*.

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1. Telaah Renstra K/L

Pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan, Visi Presiden pada bidang kesehatan diterjemahkan ke dalam Visi Kementerian Kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Di dalam Renstra Kementerian kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Misi Presiden di bidang kesehatan diterjemahkan ke dalam empat misi Kementerian Kesehatan yaitu sebagai berikut. Pertama, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kedua,

menurunkan angka *stunting* pada balita. Ketiga, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Keempat, Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri. Di samping itu, di dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020–2024, terdapat lima tujuan strategis Kementerian Kesehatan. Pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keempat, peningkatan sumber daya kesehatan. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis, terdapat delapan sasaran strategis yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut.

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Keseluruhan sasaran strategis di atas relevan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas di bidang pelayanan kesehatan. Sasaran strategis yang pertama hingga yang keenam diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu sasaran strategis ketujuh dan kedelapan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal pengampu urusan di bidang kesehatan baik di tingkat kementerian, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.

Pelayanan bidang PPKB di Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada sasaran strategis yang dicantumkan di dalam Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020-2024. Visi yang diusung di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang Guna Mendukung

Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam enam misi sebagai berikut. Pertama, mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang. Kedua, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Ketiga, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup. Keempat, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global. Kelima, memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi. Keenam, membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Sasaran strategis di dalam Renstra BKKBN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Di antara enam sasaran strategis di atas, sasaran strategis yang pertama hingga sasaran strategis yang kelima relevan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai sasaran strategis di atas. Pada sasaran strategis pertama, tenaga penyuluh masih tidak mencukupi serta dana untuk mencapai sasaran tersebut hanya berasal dari BKKBN Perwakilan. Pada sasaran strategis kedua, penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum mau memilih alat kontrasepsi modern karena adanya ketakutan akan efek samping pemakaian.

Pada sasaran strategis ketiga, terdapat penurunan penggunaan KB karena masyarakat takut ke Puskesmas akibat Covid-19. Selain itu, sumber daya manusia bidang pelayanan KB masih didominasi oleh pegawai tidak tetap yang belum memiliki pengetahuan mendalam serta balai penyuluhan KB yang belum digunakan secara efektif. Pada sasaran strategis keempat, komunikasi dan sosialisasi belum dilakukan secara merata hingga ke pulau-pulau. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya dukungan anggaran. Pada sasaran strategis kelima, masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang tinggi mengenai program PPKB, masih sebatas pada kontrasepsi. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 menghambat program-program dalam bidang pembangunan keluarga. Adapun beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran strategis di atas adalah adanya upaya peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, adanya fasilitas pelayanan di kecamatan dan desa yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pelayanan PPKB, dan adanya organisasi masyarakat dan swasta di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat bekerja sama dalam peningkatan pelayanan PPKB.

3.3.2. Telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Dalam bidang kesehatan Renstra yang ditelaah pada sub-bab ini adalah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 berpedoman pada misi ketiga Gubernur Kepulauan Riau yaitu, Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah mewujudkan Kepulauan Riau Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Untuk mencapai misi Gubernur Kepulauan Riau terdapat satu tujuan dan empat sasaran yang akan dicapai. Tujuan tersebut adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui siklus hidup. Adapun empat sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kesehatan keluarga dan lingkungan sehat;
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar;
4. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau relevan

dengan isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kepulauan Riau seperti semakin besarnya kepedulian masyarakat akan kesehatan seiring semakin meningkatnya arus informasi, pemanfaatan seminar virtual dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, adanya dukungan provinsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran di tingkat daerah Kabupaten, adanya sistem pengecekan berkala sebagai upaya pengendalian penyakit, serta adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan.

Adapun beberapa faktor penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran di atas adalah seperti adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pelayanan kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan yang jumlahnya masih terbatas di Anambas, birokrasi di bidang kesehatan yang belum berjalan secara efisien dan efektif, adanya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang melakukan pengajuan pindah kerja ke daerah lain, adanya tenaga kesehatan yang terkena COVID-19 dan tidak ada yang menggantikan, belum meratanya fasilitas kesehatan di setiap pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, sarana dan prasarana kesehatan yang belum seluruhnya memenuhi standar sehingga berdampak pada terhambatnya proses pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta pelaksanaan vaksinasi yang belum optimal karena masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi.

Dalam bidang PPKB, Renstra yang ditelaah adalah Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020–2024. Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk dapat menjamin keberhasilan capaian sasaran strategis di tingkat nasional. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

1. Angka kelahiran total (*Total fertility Rate/TFR*) per WUS usia 15-49 tahun dengan target 2,13 di tahun 2024.
2. Angka Prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) dengan target 50,00 di tahun 2024.
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dengan target 7,36 di tahun 2024.
4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*) dengan target 9 di tahun 2024.
5. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umum 25-49 tahun dengan target 23,2 pada tahun 2024.
6. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target 63,46 pada tahun 2024.

Mengacu pada hasil wawancara dengan berbagai *stakeholders* di lingkungan Dinas Kesehatan dan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis Perwakilan BKKBN Kepulauan Riau relevan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas, kecuali sasaran strategis kelima. Sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau yang relevan dengan permasalahan dan isu di Kabupaten Kepulauan Anambas juga sama dengan sasaran strategis BKKBN Nasional sehingga terdapat juga kesamaan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pencapaian sasaran strategis tersebut.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kepulauan Anambas sebagai kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas membawa konsekuensi bahwa Kepulauan Anambas secara terus menerus akan mengalami perkembangan yang dinamis dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan yang terjadi tersebut berimplikasi kepada perubahan pemanfaatan dan penggunaan ruang sehingga struktur dan pola ruang Kabupaten Kepulauan Anambas akan memerlukan penyesuaian. Penelaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan untuk dapat menghitung implikasinya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 berfungsi sebagai dokumen yang dapat mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan dinamika perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Telaahan RTRW ditujukan untuk dapat mengidentifikasi implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dengan memperhatikan struktur dan pola ruang yang ada saat ini, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.



Tabel 3. 2. Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kepulauan Anambas Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan KKA

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkelanjutan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	PKW, PKL, PPK, dan PPL	<p>PKW Perkotaan Tarempa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan kecamatan, transportasi laut, pendidikan umum, perdagangan dan jasa, pusat produksi perikanan, industri pengolahan, dan kegiatan olah raga</p> <p>PKL Tebangladan dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan pertanian dan perkebunan, pelayanan kesehatan, minapolitan, dan sebagai pusat kegiatan pertambangan lepas pantai.</p>	1 Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan	1 Sistem Pusat Kegiatan diarahkan untuk menunjang Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten, menunjang sebagai fungsi kabupaten jasa, dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai arah pengembangan kabupaten. Perencanaan struktur ruang ini berpengaruh terhadap spesifikasi jenis layanan kesehatan yang akan diberikan oleh Dinas Kesehatan KKA	1 Wilayah Ibu kota kecamatan Siantan (Tarempa) untuk pengembangan RSUD kelas C

Tabel 3. 3. Telaahan Pola Ruang Wilayah Kepulauan Anambas Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan KKA

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkelanjutan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
PERUNTUKAN RUANG UNTUK FUNGSI LINDUNG					
1	1	Kawasan rawan bencana	1 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Perlu pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan terintegrasi dengan kawasan evakuasi bencana. Penguatan Kerjasama lintas sektor (BPBD)	1 Pengembangan sistem penanggulangan bencana di Rumah Sakit dan Puskesmas
		Kawasan rawan banjir berada di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Jemaja Timur. Kawasan rawan bencana longsor berada di wilayah Kabupaten akan dilakukan penelitian lebih lanjut.	2 Penanggulangan penyakit tidak menular dan penyakit menular pascabencana	1 Perlu optimalisasi penanggulangan dan penyakit menular secara komprehensif pada kondisi pemulihan pascabencana. Terkait kejadian kasus penyakit berpotensi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) perlu optimalisasi aktivasi rencana kontijensi.	1 Pengembangan sistem surveilans penanggulangan penyakit menular berbasis teknologi informasi dengan pelacakan <i>real-time</i> dan <i>by address</i> dengan optimalisasi sistem rujukan UKM



No.	Rencana Pola Ruang		Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkelanjutan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2		3	4	5	6
				3 Penguatan logistik kesehatan pascabencana	1 Perlu perencanaan terintegrasi terkait kesiapan logistik pendukung upaya penanggulangan penyakit pada kejadian bencana	1 Integrasi pengembangan dan perencanaan logistik kesehatan untuk kejadian bencana oleh Puskesmas dan dikoordinasikan di tingkat Suku Dinas Selain itu, buffer obat untuk kejadian bencana (tentatif) didapatkan dari kementerian kesehatan dan untuk kemudian ditempatkan di Dinas Kesehatan dan/atau Suku Dinas Kesehatan
PERUNTUKAN RUANG UNTUK FUNGSI BUDI DAYA						
2	1	Kawasan pusat pemerintahan	Pola pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sampai saat ini tersebar di beberapa pola ruang kawasan.	1 Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan unggulan sesuai spesifikasi kawasan dan penduduknya disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjangnya	1 Pengembangan fokus/unggulan layanan kesehatan pada Puskesmas berkonsep perdesaan (rural)	1 Terdapat pada 7 kecamatan
	2	Kawasan peruntukan permukiman			2 Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah dengan kekhususan spesifikasi sebagai bagian integrasi	1 Terdapat pada 3 kecamatan
	3	Kawasan peruntukan pertanian				
	4	Kawasan peruntukan industri				

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkelanjutan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
1	2	3	4	5	6
	5 Kawasan peruntukan pariwisata			pelayanan kesehatan tingkat lanjut	

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program (KRP). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, tujuan dilakukannya telaah KLHS adalah untuk mengidentifikasi apakah ada program atau kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3. 4. Telaahan KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan PPKB KKA

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
1	2	3	4	5
1	Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi masih rendah	Angka capaian imunisasi masih jauh dari yang telah di targetkan TPB 2030 yang menargetkan seluruh anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satu persoalan utamanya adalah faktor geografis kepulauan, bahwa layanan dasar imunisasi sulit untuk dijangkau disebabkan banyaknya penduduk yang tersebar di pulau-pulau pelosok yang notabene jauh dari akses pelayanan kesehatan.	Peningkatan pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada bayi melalui 1) pembentukan kelompok peduli imunisasi, dan ii) layanan jemput bola imunisasi
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kurangnya kesadaran masyarakat atas kesehatan ibu hamil dan melahirkan; Fasilitas persalinan yang kurang memadai dan merata terutama di daerah-daerah terpencil; Minimnya tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan bidan.	Tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Anambas mengakibatkan presentase capaian SDGs untuk indikator tersebut berwarna merah. Dengan target SDGs pada tahun 2030 yang mengharuskan angka kematian ibu berada di bawah 70	Penurunan AKI dapat melalui: 1). Penguatan dan pemerataan Puskesmas dan jaringannya terutama dalam fasilitas persalinan, ketersediaan dokter spesialis dan bidan; 2). Penguatan manajemen program dan sistem rujukannya yang berbasis kepulauan; 3). Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kesehatan ibu hamil.





No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
3	Prevalensi tekanan darah tinggi	Perilaku masyarakat yang jauh dari hidup sehat; Minimnya pengetahuan tentang penyakit tekanan darah tinggi.	Tingginya angka prevalensi tekanan darah tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas, mengakibatkan persentase capaian SDGs berwarna merah, sehingga perlu upaya intervensi tinggi yang harus dilakukan dalam mengurangi angka tersebut pada tahun 2030.	Penurunan prevalensi tekanan darah tinggi dapat melalui: 1. Peningkatan layanan terhadap pengukuran tekanan darah tinggi; 2. Meningkatkan upaya kampanye hidup sehat kepada masyarakat.
4	<i>Unmet need</i> Pelayanan Kesehatan	Belum adanya perencanaan yang baik di tingkat keluarga, Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap alat kontrasepsi yang dibutuhkan.	Tingginya angka <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, mengakibatkan persentase capaian SDGs berwarna merah, sehingga perlu upaya intervensi tinggi yang harus dilakukan dalam mengurangi angka tersebut pada tahun 2030.	Penurunan <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan dapat melalui: 1. Pemerataan akses pelayanan KB yang lebih merata dan berkualitas terutama untuk wilayah pulau-pulau terpencil; 2. Konseling, komunikasi, informasi dan edukasi oleh Penyuluh KB dalam menjawab isu-isu terkait efek samping alat kontrasepsi.

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra

3.4.3. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Selain analisis terhadap dokumen dan pedoman kebijakan nasional dan daerah, komitmen terhadap kesepakatan global juga menjadi bagian dari isu kesehatan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam mendukung komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030.

Dengan demikian, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui penyelarasan dan adaptasi tujuan, sasaran, dan indikatornya ke dalam program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya untuk tujuan dari TPB/SDGs, yaitu:

2 TANPA KELAPARAN 	Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA 	Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
5 KESETARAAN GENDER 	Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 	Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Gambar 3. 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan sektor Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: Bappenas

Rincian dari 4 (empat) tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Berkaitan dengan Kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	
Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.
Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	
3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1.*	Angka Kematian Ibu (AKI).
		3.1.2.*	proporsi perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
		3.1.2.(a)	persentase perempuan pernah kawin umur 15–49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2.(b)	persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	prevalensi HIV pada populasi dewasa.
		3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
		3.3.3*	kejadian malaria per 1000 orang.
		3.3.3.(a)	jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
		3.3.4.(a)	persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B.
		3.3.5*	jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta)
		3.3.5.(a)	jumlah provinsi dengan eliminasi kusta.
		3.3.5.(b)	jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan	3.4.1.	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.
		3.4.1.(a)	persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.
		3.4.1.(b)	prevalensi tekanan darah tinggi.



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	
	kesejahteraan.	3.4.1.(c)	prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
		3.4.2*	angka kematian (incidence rate) akibat bunuh diri.
		3.4.2.(a)	jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15 -49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).
		3.7.2.*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).
		3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).
		3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.
		3.8.2	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.1	Angka kematian akibat tangga dan polusi udara ambien.
		3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.
		3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	
		3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan.
		3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
		3.b.2	<i>Total Official Development Assistant (ODA)</i> untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
3.d	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.
Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan			
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
		5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	
	konferensi- konferensi tersebut.		metode kontrasepsi modern.
		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman (khususnya limbah medis)

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Keberhasilan dan kegagalan pembangunan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, tentunya berkaitan erat dengan dukungan lintas program dan lintas sektoral untuk mencapai pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk terus melakukan advokasi dalam rangka mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan lain dari lintas

sektor untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang baik demi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk memberikan dasar yang kuat dalam memberikan advokasi dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan lain, diperlukan perumusan isu-isu strategis yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dalam menentukan isu strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas, berikut adalah beberapa pertimbangan yang digunakan:

1. Tolak ukur

Suatu isu dapat dikatakan sebagai isu yang strategis apabila:

- a. Aktual (sedang/baru saja terjadi/*up to date* dan menjadi perhatian masyarakat),
- b. Relevan dengan masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat, khususnya lapisan yang menjadi konstituen utama dari kerja-kerja advokasi tersebut.
- c. Mendesak/Urgen dan sangat penting untuk diberi perhatian segera, dan dapat berakibat fatal jika tidak segera diatasi
- d. Berpotensi memberikan dampak/pengaruh yang besar dan meluas,
- e. Jika berhasil ditangani akan berdampak positif dan dapat menjadi jawaban dari beberapa persoalan sekaligus
- f. Umumnya tidak ditolak oleh pendapat umum setempat, masyarakat umumnya sependapat atau setuju bahwa isu tersebut memang menjadi masalah. Yang perlu mendapatkan perhatian

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan tupoksi dan kinerja perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada tahun 2021-2026, Kabupaten Kepulauan Anambas menitikberatkan 12 isu strategis yang telah diprioritaskan berdasarkan 5 (lima) kriteria penilaian dengan nilai bobot tertentu berdasarkan level kepentingan masing-masing kriteria. Berikut adalah tabel kriteria dan pembobotan isu strategis yang digunakan untuk menentukan prioritas isu strategis:

Tabel 3. 6. Kriteria Skoring Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Kriteria	Bobot Kriteria
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan KKA, Provinsi, dan Nasional	3,5
2	Memiliki dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	1,5
3	Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pembangunan daerah KKA	1
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	1,5
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	2,5
	Total Skor	10

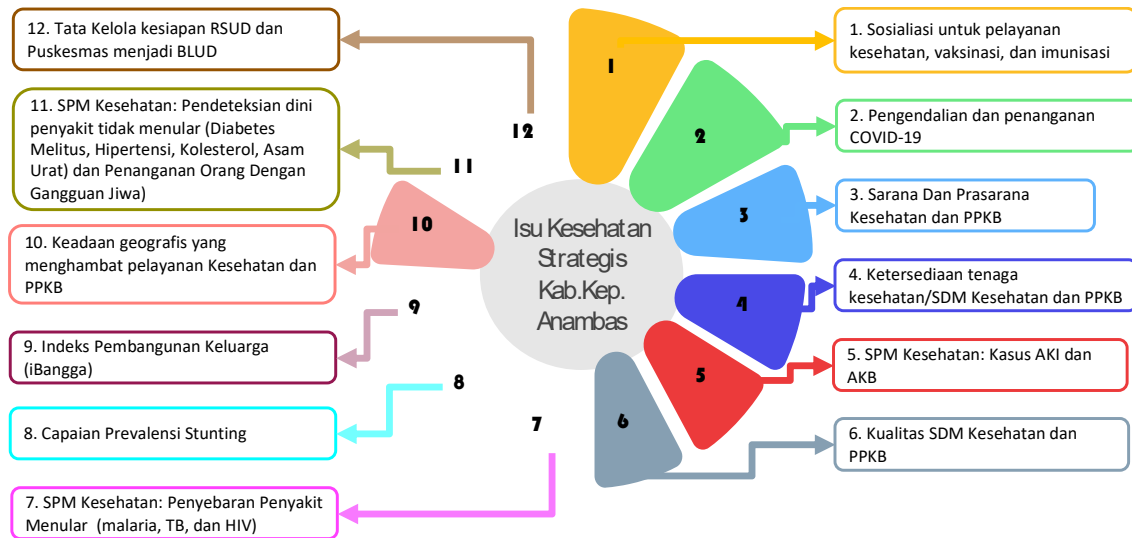
Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021

Berdasarkan hasil skoring menggunakan kriteria di atas, berikut adalah hasil prioritas isu strategis yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas:

Tabel 3. 7. Hasil Skoring Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Isu Strategis	Total Skor
1	Sosialisasi untuk pelayanan kesehatan, vaksinasi, dan imunisasi	85,36
2	Pengendalian dan penanganan COVID-19	84,88
3	Sarana Dan Prasarana Kesehatan dan PPKB	83,99
4	Ketersediaan tenaga kesehatan/SDM Kesehatan dan PPKB	83,12
5	SPM Kesehatan: Kasus AKI dan AKB	83,09
6	Kualitas SDM Kesehatan dan PPKB	81,81
7	SPM Kesehatan: Penyebaran Penyakit Menular (malaria, TB, dan HIV)	79,64
8	Capaian Prevalensi <i>Stunting</i>	79,30
9	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	78,53
10	Keadaan geografis yang menghambat pelayanan Kesehatan dan PPKB	78,27
11	SPM Kesehatan: Pendeteksian dini penyakit tidak menular (Diabetes Melitus, Hipertensi, Kolesterol, Asam Urat) dan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa)	77,92
12	Tata Kelola kesiapan RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD	76,92

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021



Gambar 3. 2. Prioritas Isu Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: Hasil Olahan Tim Penyusun Renstra 2021

Isu-isu strategis di atas didapatkan dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, PPKB) yang ditinjau dari capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan BKKBN, serta implikasinya terhadap Dokumen RTRW dan KLHS yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah” atau disingkat menjadi ANAMBAS BERMADAH 2. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama misi ke 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam rentang waktu Tahun 2021-2026. Tujuan dimaksud merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sementara itu, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan disusun sebagai berikut:



**Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Periode 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas		Umur Harapan Hidup	67,21	67,41	67,6	67,8	67,99	68,19	68,39
		1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10.3/1000 Kelahiran Hidup (KH)	10,2/1000 KH	10,1/1000 KH	10,1/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
			Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,00%	91,00%	93,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%
			Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.31	0.3	0.28	0.28	0.25	0.25	0.2
			Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	95,56%	95,56%	96,51%	97,47%	98,44%	98,44%	98,44%
			Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi	69,23%	69,23%	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2	Persentase	25,00%	30,00%	55,00%	73,00%	82,00%	100,00%	100,00%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK							
			Persentase Posyandu Aktif	65,00%	71,00%	74,00%	78,00%	84,00%	88,00%	88,00%
			Persentase Desa Siaga Aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Mewujudkan Keluarga yang Tentram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)		Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	55,73	57,22	58,73	60,22	61,73	63,22	64,73
		2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	Persentase Kampung KB yang dibina	25,00%	25,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%
		2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	Persentase meningkatnya pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	76,00%	77,00%	77,00%	78,00%	78,00%	79,00%	79,00%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan		Indeks Reformasi Birokrasi	C (50)	C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	BB (79)
		3.1 Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	C (50)	C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	BB (79)



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dan Akuntabel	Kinerja	(AKIP)							
			Indeks Kepuasan Masyarakat	C (75)	C (75)	C (75)	B (81)	B (81)	B (82)	B (82)

Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun Renstra, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2026 dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah			
Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah			
Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta menurunnya angka kesakitan dan kematian	1.1.1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata	1.1.1.1 Penguatan dan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar
			1.1.1.2 Penerapan standar mutu pelayanan kesehatan
			1.1.1.3 Peningkatan kualitas kesehatan ibu, anak, dan remaja
			1.1.1.4 Peningkatan kualitas hidup Lansia
			1.1.1.5 Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
		1.1.2 Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit	1.1.2.1 Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular
			1.1.2.2 Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi-
			1.1.2.3 Peningkatan sosialisasi terkait vaksin dan imunisasi
			1.1.2.4 Optimalisasi surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah-
			1.1.2.5 Penanggulangan <i>new emerging disease</i> dan <i>re-emerging disease</i> -
			1.1.2.6 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pengendalian faktor risiko-



Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah

Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah

Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		1.1.3 Meningkatkan kinerja organisasi	1.1.3.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
			1.1.3.2 Penataan data dan sistem informasi Kesehatan
			1.1.3.3 Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja
	1.2 Meningkatnya sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan PPKB	1.2.1 Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas	1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan.
			1.2.1.2 Peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan, dan alat kesehatan.
			1.2.1.3 Penataan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) pada sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.
			1.2.1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
			1.2.1.5 Mengupayakan tercapainya pembiayaan kesehatan
		1.2.2 Meningkatkan dan memelihara kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya dan mendorong kemandirian	1.2.2.1 Pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pola hidup bersih dan sehat
			1.2.2.2 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini melalui Desa Siaga.
			1.2.2.3 Memobilisasi masyarakat dalam rangka mendukung UKBM.
			1.2.2.4 Pengembangan kemitraan masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan.
			1.2.2.5 Pemeliharaan dan pengawasan kualitas kesehatan



Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah

Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah

Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			lingkungan-
			1.2.2.6 Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita-
			1.2.2.7 Peningkatan jumlah desa bebas masalah kesehatan prioritas-
			1.2.2.8. Mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
2. Mewujudkan Keluarga yang Tenram, Mandiri, dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	2.1 Terkendalinya jumlah penduduk	2.1.1 Meningkatkan penyuluhan dan layanan terkait Pengendalian Penduduk dan KB	2.1.1.1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
			2.1.1.2 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
			2.1.1.3 Pemerataan pelayanan KB dan kebutuhan alat kontrasepsi
			2.1.1.4 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB
	2.2 Meningkatkan cakupan keluarga berkualitas	2.1.2 Meningkatkan kesejahteraan keluarga	2.1.2.1 Pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			2.1.2.2 Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan dalam pembangunan keluarga
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.1.1 Meningkatkan Internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai Renstra Dinas Kesehatan PPKB	3.1.1.1 Memperkuat dan meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan kinerja SDM
		3.1.2 Melanjutkan penyelesaian agenda Reformasi Birokrasi dan	3.1.2.1 Penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana



Visi KKA : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah

Misi No 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya, serta Berakhlakul Karimah

Misi No 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		SAKIP	organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
		3.1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	3.1.3.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - a. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten
 - b. Perencanaan kebutuhan dan⁸⁹pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten

- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - b. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten
 - c. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan:
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten
 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)



- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan:
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - c. Adapun rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif terangkum dalam Tabel 6.1 berikut ini.



Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi persentase tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan x 100 %	0%	100 %	Rp 83.818.223.127	100 %	Rp 88.739.111.665	100 %	Rp 92.052.913.000	100 %	Rp 93.048.412.500	100 %	Rp 94.005.528.125	100 %	Rp 95.320.362.731	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	= Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun / Jumlah Perencanaan, Penganggaran,	0	100 %	Rp 734.359.000	100 %	Rp 549.947.312	100 %	Rp 20.250.000	100 %	Rp 20.512.500	100 %	Rp 20.788.125	100 %	Rp 21.077.531	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah x 100%															
1.02.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan melaksanakan administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100%	100 %	Rp 52.412.747.792	100 %	Rp 52.412.747.792	100 %	Rp 54.950.000.000	100 %	Rp 55.499.500.000	100 %	Rp 56.054.495.000	100 %	Rp 56.615.039.950	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.01	Administrasi	Persentase OPD	= Jumlah OPD	100%	100	Rp	100	Rp	100	Rp	100	Rp	100	Rp	100	Rp	Dinas	Kabupaten



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.2.03	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah	Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%		%	-	%	60.000.000	%	63.000.000	%	66.150.000	%	69.457.500	%	72.930.375	Kesehatan PPKB	Kepulauan Anambas
1.02.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	= Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah /	100%	100 %	Rp 124.663.000	100 %	Rp -	100 %	Rp 394.663.000	100 %	Rp 126.000.000	100 %	Rp 132.300.000	100 %	Rp 138.915.000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%															
1.02.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100%	100 %	Rp 2.596.979.465	100 %	Rp 6.263.410.889	100 %	Rp 5.330.000.000	100 %	Rp 5.596.500.000	100 %	Rp 5.532.950.000	100 %	Rp 5.809.597.500	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100%	100 %	Rp 27.309. 737.37 0	100 %	Rp 28.333. 045.96 3	100 %	Rp 30.070. 000.00 0	100 %	Rp 30.453. 500.00 0	100 %	Rp 30.844. 975.000	100 %	Rp 31.244. 711.750	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan Yang melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Jumlah OPD Dinkes PPKB dan UPT Kesehatan x 100%	100%	100 %	Rp 639.73 6.500	100 %	Rp 1.119.9 59.709	100 %	Rp 1.225.0 00.000	100 %	Rp 1.286.2 50.000	100 %	Rp 1.350.5 62.500	100 %	Rp 1.418.0 90.625	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.01 .2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan	= Jumlah UPT Kesehatan Yang dilakukan Peningkatan	100%	100 %	Rp -	100 %	Rp -	100 %	Rp 500.00 0.000	100 %	Rp 150.00 0.000	100 %	Rp 150.000 .000	100 %	Rp 150.000 .000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD / Jumlah UPT Kesehatan x 100%															
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan Kesehatan masyarakat yang terpenuhi	Jumlah penduduk peserta BPJS termasuk JKN yang terlayani /jumlah penduduk anambas*100%	71,58%	72,43%	Rp 85.463.331.142	73,28%	Rp 88.397.305.073	74,27%	Rp 76.237.876.961	75,26%	Rp 79.513.135.494	76,25%	Rp 145.993.582.460	77,24%	Rp 188.220.027.625	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
		Persentase desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan Kabupaten sehat	Jumlah desa dan kelurahan yang dilakukan pembinaan tatanan kabupaten sehat/ jumlah total desa dan kelurahan*100%	37,04%	46,30%		55,56%		64,81%		74,07%		83,33%		100,00%			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			kesehatan milik pemerintah dan swasta / Jumlah semua ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%															
		Persentase jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar / Jumlah semua bayi baru lahir	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%															
		Persentase jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persentase jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani /	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			jumlah yang ditargetkan dikali 100															
		Persentase jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persentase jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani /	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			jumlah yang ditargetkan dikali 100															
		Persentase jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persentase jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		layanan kesehatan	kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100															
		Persentase jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Persentase jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		layanan kesehatan	kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan dikali 100															
		Persentase jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan yang ditangani / jumlah yang ditargetkan	100,00%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dikali 100															
		Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah kematian Ibu pada satu tahun / jumlah kelahiran hidup dikali 100	225/100.000 KH	215/100.000 KH		205/100.000 KH		195/100.000 KH		185/100.000 KH		183/100.000 KH		183/100.000 KH			
		Prevalensi Stunting	Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) = jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumlah	15.64	15.14		14.64		14.14		13.14		12.14		12.14			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			anak balita pada waktu yang sama*100%															
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya	= Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dipenuhi sarana dan prasarananya / Jumlah Fasilitas Kesehatan x 100%	0	100 %	Rp 60.279.155.410	100 %	Rp 61.987.903.548	100 %	Rp 44.479.498.561	100 %	Rp 48.680.107.094	100 %	Rp 113.015.204.060	100 %	Rp 148.870.276.225	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Meningkatkan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	=Jumlah Masyarakat Ber-PHBS/Jumlah Masyarakat diperiksa x 100%	30%	35%	Rp 25.184.175.732	40%	Rp 26.409.401.525	45%	Rp 31.258.378.400	50%	Rp 30.833.028.400	55%	Rp 32.978.378.400	55%	Rp 39.349.751.400	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Annual Parasite Insidens (API)	= Kasus Malaria yang dimonfirmasi 1 Tahun / Jumlah Populasi peride tertentu x 1000	0,31	0,3		0,28		0,28		0,25		0,25		0,2			
		Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	=Jumlah desa/kelurahan UCI disatu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumla h desa/kelurahan disuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama*100	91	91				93				94					



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19	Jumlah Masyarakat Yang Telah Mendapatkan Vaksin Covid-19/Jumlah Masyarakat yang ditargetkan*100	0	82,6 1		85,3 6		88,1 2		90,8 7		93,6 2		96,3 8			
		Persentase Tatanan Masyarakat yang melaksanakan Posbindu PTM	= Kasus Penduduk Usia produktif yang melakukan screening Faktotr Resiko PTM / Jumlah Populasi peride tertentu x 100%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.02 .2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah	= Jumlah Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi di perangkat daerah / Jumlah aplikasi x 100%	95,56	95,56	Rp -	96,51	Rp -	97,47	Rp 500.000.000	98,44	Rp -	98,44	Rp -	98,44	Rp -	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	Jumlah SDM yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan / Jumlah SDM x 100%	30%	30%	Rp -	60%	Rp 838.302.038	80%	Rp 759.139.500	855%	Rp 831.340.569	90%	Rp 1.602.740.309	90%	Rp 2.169.624.248	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.03 .2.01	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/k ota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki perizinan praktik tenaga kesehatan	= Jumlah Tenaga Kesehatan yang memilki perizinan praktik tenaga kesehatan / Jumlah Tenaga Kesehatan x 100%	0	56,5 5	Rp -	63,6 4	Rp -	72,7 3	Rp 59.139. 500	81,8 2	Rp 56.340. 569	100, 00	Rp 74.210. 309	100 Rp 82.624. 248		Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.03 .2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagun aan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilavah	Persentase Fasilitas Kesehatan dan dibina dan dievaluasi SDM Kesehatan	= Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pembinaan dan evaluasi SDMK / Jumlah Fasilitas Kesehatan x 100%	0%	100 %	Rp -	100 %	Rp 58.302. 038	100 %	Rp 125.00 0.000	100 %	Rp 125.00 0.000	100 %	Rp 450.000 .000	100 %	Rp 450.000 .000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.03 .2.03	kabupaten/kota																	
	Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sdmk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan	= Jumlah SDMk yang terlatih sesuai dengan mutu dan standar kompetensi tenaga kesehatan / Jumlah SDMk x 100%	0	0	Rp -	60	Rp 780.00 0.000	80	Rp 575.00 0.000	85	Rp 650.00 0.000	90	Rp 1.078.5 30.000	90	Rp 1.637.0 00.000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan farmasi alat kesehatan dan makanan dan minuman	= Jumlah tersedianya alat farmasi, alat Kesehatan, dan makanan/jumlah alat farmasi, alat Kesehatan, dan makanan yang dibutuhkan x 100%	66%	67%	Rp 485.33 4.000	68%	Rp 255.08 8.519	78%	Rp 210.00 0.000	82%	Rp 210.00 0.000	86%	Rp 210.000 .000	92%	Rp 210.000 .000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.04 .2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	Persentase Sertifikat PIRT Yang di Terbitkan	= Jumlah Sertifikat PIRT yang diterbitkan/jumlah Industri Pangan Rumah Tangga yang terdapat di kabupaten/kota x 100%	0	0	Rp 150.00 0.000	45%	Rp 115.08 8.519	50%	Rp 70.000. 000	55%	Rp 70.000. 000	60%	Rp 70.000. 000	65%	Rp 70.000. 000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
1.02.04 .2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan pembinaan	=Jumlah TPM dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan pembinaan/ Jumlah Seluruh TPM dan Sentra Makanan x 100%	0	0	Rp 150.000.000	45%	Rp 90.000.000	50%	Rp 90.000.000	55%	Rp 90.000.000	60%	Rp 90.000.000	65%	Rp 90.000.000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi	= Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang Diawasi /Jumlah Sarana Produksi Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga x 100 %	0	30%	Rp 185.334.000	45%	Rp 50.000.000	50%	Rp 50.000.000	55%	Rp 50.000.000	60%	Rp 50.000.000	65%	Rp 50.000.000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pembinaan kesehatan masyarakat di desa	= (Jumlah desa yang dilakukan pembinaan Kesehatan/jumlah desa-kelurahan) / (54 desa-kelurahan) * 100%	61%	64,81%	Rp 342.734.610	68,52%	Rp 293.351.797	72,22%	Rp 265.650.000	75,93%	Rp 290.915.730	79,63%	Rp 560.856.026	83,73%	Rp 759.228.944	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Strata Posyandu Aktif Dari Madya ke Purnama	= Jumlah Posyandu aktif purnama/ Jumlah Posyandu Madya x 100%	65%	71%	Rp 120.000.000	74%	Rp 93.351.797	78%	Rp 93.351.797	84%	Rp 90.915.730	88%	Rp 136.856.026	88%	Rp 202.980.332	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase UKBM Aktif	= Jumlah UKBM Aktif/ Jumlah UKBM x 100%	100%	100%	Rp -	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 72.298.203	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 266.124.306	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
1.02.05 .2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS	= Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS/Jumlah Rumah Tangga x 100%	21,14%	30%	Rp 222.73 4.610	38%	Rp 100.00 0.000	45%	Rp 100.00 0.000	60%	Rp 100.00 0.000	75%	Rp 224.000 .000	602 %	Rp 290.124 .306	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks advokasi dan pengendalian penduduk	(Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang tersusun /Jumlah Total Dokumen Data Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang harus dimiliki x 40%)+(Jumlah Sekolah SLTP yang mendapat Pendidikan kependudukan /jumlah SLTPx 30%)+ ((100-(jumlah PUS dengan usia istri	60,15	60,15	Rp -	60,24	Rp 350.000	62,07	Rp 367.500.000	63,91	Rp 385.875.000	65,74	Rp 405.168.750	65,75	Rp 425.427.188	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			di bawah 21 tahun/jumlah PUS)x30%)															
		Laju pertumbuhan penduduk	Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.	2,37	2,23		2,14		2,09		2,05		2,01		2,00			



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Total Fertility Rate (TFR)	Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun	2,88	2,85		2,82		2,81		2,79		2,78		2,77			
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Rancangan Kependudukan	Rumus = Jumlah OPD yang memanfaatkan Rancangan Kependudukan/ Jumlah OPD yang ditargetkan * 100%	0	0	Rp -	100 %	Rp 200.00 0.000	100 %	Rp 217.50 0.000	100 %	Rp 130.00 0.000	100 %	Rp 80.175. 000	100 %	Rp 90.000. 000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengendalian Kuantitas Penduduk																	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program	Rumus = Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) / sektor yang ada x 100%	0	0	Rp -	100 %	Rp 150.00 0.000	100 %	Rp 150.00 0.000	100 %	Rp 255.87 5.000	100 %	Rp 324.993 .750	100 %	Rp 335.427 .188	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pembangunan																
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	indeks pembinaan keluarga berencana	= ((partisipasi KB aktif/ Jumlah PUS X40%)+(Jumlah PIK Remaja Jalur Sekolah/ Jumlah Sekolah Menengah Atas Sederajat x 10%) +(Jumlah PIK remaja Jalur masyarakat/ Jumlah Desa dan	63,11	63,37	Rp 3.511.139.363	63,4	Rp 399.840.000	63,87	Rp 419.832.000	64,44	Rp 440.823.600	65,53	Rp 462.864.780	65,53	Rp 486.008.019	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kelurahan x 10%) + (Jumlah keluarga yang masuk kel BKB/Jumlah keluarga sasaran BKB x10 %)+(Jumlah keluarga yang masuk kel BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR x10 % (Jumlah keluarga yang masuk kel BKL/Jumlah keluarga sasaran BKL x10 %)+(Jumlah															



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			kelompok UPPKS / Jumlah Keluarga x 10 %)																				
		Contraceptive Privalence Rate (CPR) Modern	Sumber data dari BKKBN	58,88	58,98														59,07	59,16	59,25	59,34	59,4
		Unmet Need	Sumber data dari BKKBN	10,27	9,24														8,58	8,09	7,72	7,42	7,35
		Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Sumber data dari BKKBN	14,84	16,18														17,5	18,87	20,22	21,56	22,2
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Persentase mitra kerja program KKBPK yang aktif dalam pengelolaan pelayanan dan	= Jumlah mitra kerja program KKBPK yang aktif /Jumlah mitra kerja program KKBPK	0	100 %	Rp 155.65 1.000	100 %	Rp -	100 %	Rp 169.83 2.000	100 %	Rp 169.83 2.000	100 %	Rp 169.832 .000	100 %	Rp 169.832 .000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas					



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengendalian Pendudukan dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	pembinaan kesertaan ber-KB	yang sudah terbentuk x 100%															
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan oleh Petugas Lapangan KB	= Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan/Jumlah IMP (Institusi masyarakat pedesaan) yang ada x 100%	100%	0%	Rp -	0%	Rp -	100 %	Rp 50.000.000	100 %	Rp 50.000.000	100 %	Rp 50.000.000	100 %	Rp 50.000.000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	(Peserta KB aktif modern / Pasangan Usia Subur) x 100%	37,95%	37,5 0%	Rp 2.761.095.376	37,0 0%	Rp 283.000.000	36,5 0%	Rp 150.000.000	36,0 0%	Rp 170.991.600	35,5 0%	Rp 193.032.780	35,0 0%	Rp 216.176.019	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 14 03 2.04	Pemberdaya an dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	= Jumlah peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB/ Jumlah Kecamatan yang ada x 100%	100%	100 %	Rp 594.39 2.987	100 %	Rp 116.84 0.000	100 %	Rp 50.000. 000	100 %	Rp 50.000. 000	100 %	Rp 50.000. 000	100 %	Rp 50.000. 000	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas
2 14 04	PROGRAM PEMBERDA YAAN DAN PENINGKAT AN	Angka Fertilitas menurut umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR)	Jumlah angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok	13,51	13,5 1	Rp -	13,5 1	Rp 258.22 0.000	13,5 1	Rp 271.13 1.000	13,5 1	Rp 284.68 7.550	13,5 1	Rp 298.921 .928	13,5 1	Rp 313.868 .024	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)		umur 15-19 Tahun.															
		Usia Kawin Pertama (UKP)	Rata Rata umur dimana dari semua wanita pada kelompok umur 10-49 tahun sudah kawin	21	21		21		21		21		22		22			
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan	Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R Yang diberi pelatihan dibagi Jumlah Kader BKB BKR, PPKA, PIK - R yang ada di kali 100%	100%	100%	Rp -	100%	Rp 158.220.000	100%	Rp 120.000.000	100%	Rp 133.556.550	100%	Rp 133.556.550	100%	Rp 148.502.646	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas



Kode	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Defisini Operasional (Rumus Menghitung)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana aan	Target Kinerja Program dan Kegiatan, Subkegiatan, dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ngjawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)			
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguna n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga	Persentase Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Rumus = Jumlah Mitra dan Organisasi yang dilakukan Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan hteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S) / Jumlah Mitra dan Organisasi x 100%	0%	0%	Rp -	100 %	Rp 100.00 0.000	100 %	Rp 151.13 1.000	100 %	Rp 151.13 1.000	100 %	Rp 165.365 .378	100 %	Rp 165.365 .378	Dinas Kesehatan PPKB	Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun Renstra, 2021



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana lima tahun ke depan (2021-2026), dengan tahun 2021 sebagai tahun peralihan, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD KKA tahun 2021-2026. Hal tersebut sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD KKA tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang pada Tabel 7.1 berikut:



Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Tahun
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Umur Harapan Hidup	67,21	67,41	67,60	67,80	67,99	68,19	68,39
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	10,3/1000 Kelahiran Hidup (KH)	10,2/1000 KH	10,1/1000 KH	10,1/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
3	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,00%	91,00%	93,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%
4	Angka Annual Parasite Insidens (API)	0.31	0.3	0.28	0.28	0.25	0.25	0.2
5	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan jaminan kesehatan	95,56%	95,56%	96,51%	97,47%	98,44%	98,44%	98,44%
6	Persentase fasilitas kesehatan milik	69,23%	69,23%	69,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Tahun
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	pemerintah yang terakreditasi							
7	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM	25%	30%	55%	73%	82%	100%	100%
8	Persentase Posyandu Aktif	65%	71%	74%	78%	84%	88%	88%
9	Persentase Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	55,73	57,22	58,73	60,22	61,73	63,22	64,73
11	Persentase Kampung KB yang dibina	25,00%	25,00%	50,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%
12	Persentase pembinaan keluarga berencana yang dilaksanakan	76,00%	77,00%	77,00%	78,00%	78,00%	79,00%	79,00%
13	Indeks Reformasi	C (50)	C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	BB (79)



No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Tahun
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Birokrasi							
14	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP)	C (50)	C (50)	C (50)	CC (51,76)	CC (51,76)	BB (78)	BB (79)
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	C (75)	C (75)	C (75)	B (81)	B (81)	B (82)	B (82)

Sumber : Tim Penyusun Renstra, 2021



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Selain itu, dokumen Renstra Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 memperhatikan Renstra Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Visi dan Misi di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dapat mengubah orientasi pembangunan kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan terintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Secara umum dokumen Rencana Strategis adalah sebuah garis kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan pemasaran produk/jasa pelayanan kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara teknis Renstra dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-kegiatan-sub kegiatan, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparaturnya Dinas Kesehatan PPKB untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Dokumen Renstra diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang kesehatan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya pada tahun 2021-2026 benar-benar akan terwujud sesuai visi Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju,



dan Berakhlakul Karimah melalui misi ke 1 yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah.

Tarempa, 05 Agustus 2022

**Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana**



YESSY ARIESSANDY, S.Farm, Apt

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19810418 200604 2 019

